



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA

Laporan Akhir

KAJIAN INDEKS DAYA SAING DAERAH KOTA SURAKARTA



TAHUN 2020



BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH (BAPPPEDA)
KOTA SURAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dokumen Penyusunan Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta dapat diselesaikan dengan baik.

Kegiatan ini bermaksud untuk mengoptimalkan indeks daya saing daerah Kota Surakarta dan bertujuan (1) Mengidentifikasi indeks daya saing Daerah Kota Surakarta tahun 2020; (2) Menganalisis dampak pandemic Covid 19 terhadap indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2020; (3) Menganalisis dan merekomendasikan kebijakan ekonomi Kota Surakarta untuk mengantisipasi resesi ekonomi global. Dengan kajian Indeks daya saing daerah kota surakarta maka akan memiliki dokumen sebagai ukuran dan perbandingan serta trend perubahan indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2020 dan dapat memberikan gambaran tentang arah perubahan indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2021.

Dengan menyadari bahwa kajian ini masih banyak kekurangannya, masukan dari semua pihak sangat kami harapkan. Kami sampaikan juga ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan penyusunan ini.

Surakarta, 14 September 2020

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tujuan Penelitian	7
C. Manfaat Penelitian.....	7
D. Sasaran	7
E. Ruang Lingkup Kegiatan	7
F. Keluaran Kegiatan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Daya Saing Daerah	9
B. Indikator Utama dan Prinsip Daya Saing Daerah	15
C. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta	20
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Desain Penelitian.....	24
B. Populasi dan Sampel	24
C. Alat Analisis	24
BAB IV GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA	26
A. Kondisi Administrasi Wilayah.....	26
B. Kondisi Geografis	28
C. Kondisi Rencana Struktur Ruang.....	29
D. Kondisi Perekonomian Daerah	30
E. Kependudukan	38

BAB V ANALISIS DAYA SAING DAERAH	42
A. Keadaan Terkini	42
B. Pertumbuhan Daya Saing Kota Surakarta (2018-2020)	55
C. Arah Kebijakan Pembangunan	60
D. Solusi Menyeluruh	68
E. Tata Kelola dan Dukungan	71
 BAB VI PENUTUP	 71
A. Kesimpulan	71
B. Rekomendasi	72

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Kota Surakarta	26
Gambar 4.2	Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2013 Sampai dengan 2019	31
Gambar 5.1	Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Aspek .	45
Gambar 5.2	Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Pilar ...	48
Gambar 5.3	Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi	52
Gambar 5.4	Indeks Daya Saing berdasarkan Aspek 2018- 2019	56
Gambar 5.5	Indeks Daya Saing berdasarkan Pilar 2018-2020	58
Gambar 5.6	Indeks Daya Saing berdasarkan Dimensi 2018- 2020	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komponen Daya Saing Daerah Tahun 2020	5
Tabel 4.1	Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta .	27
Tabel 4.2	Kondisi Topografi Kota Surakarta	28
Tabel 4.3	Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta Tahun 2011-2031	29
Tabel 4.4	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kota Surakarta Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)	33
Tabel 4.5	PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)	35
Tabel 4.6	Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2015-2019	36
Tabel 4.7	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2015-2019	37
Tabel 4.8	Jumlah penduduk Kota Surakarta Tahun 2015-2019	38
Tabel 4.9	Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta 2019	40
Tabel 4.10	Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta 2010-2019	41
Tabel 5.1	Hasil Analisis <i>Shift Share</i> dan <i>Location Quotient</i> (LQ)	44
Tabel 5.2	Indikator IDSD 2020 Dalam Kategori Terendah	53
Tabel 5.3	Perbandingan Skor IDSD Berdasarkan Aspek Tahun 2018-2020	55

Tabel 5.4	Perbandingan IDSD Berdasarkan Pilar Tahun 2018-2020	57
Tabel 5.5	Program dan Kegiatan Peningkatan IDSD Kota Surakarta Tahun 2021	73

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Daya saing sebuah kota atau negara sebenarnya sama dengan daya saing sebuah perusahaan atau organisasi. Kebutuhan membangun daya saing terkait dengan keberlanjutan sebuah organisasi. Porter (2010) menyampaikan bahwa sebuah wilayah memerlukan daya saing sebagai sarana untuk berkembang baik dari sisi ekonomi, bisnis maupun kelangsungan wilayah itu sendiri. Indeks daya saing daerah adalah ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan seluruh potensi yang dimilikinya melalui peningkatan produktivitas, nilai tambah dan persaingan baik domestik maupun internasional demi kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Kota Surakarta merupakan salah satu simpul penting pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Tengah. Aktivitas ekonomi di kota ini didominasi oleh sektor perdagangan menjadi bagian penting dari mata rantai bisnis di kawasan Soloraya secara khusus, maupun Jawa Tengah secara umum. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta berfluktuatif meskipun tidak ekstrem. Tahun 2018 pertumbuhan kota ini mencapai 5,75 persen, tahun 2019 pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 5,78 persen.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta tahun 2019 didominasi oleh sektor konstruksi dengan persentase mencapai 27,11 persen yang diikuti dengan sektor perdagangan besar, eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan persentase 22,16 persen. Berdasarkan data ini, maka kita bisa melihat bahwa perekonomian Kota Surakarta tergantung pada kinerja dua sektor ekonomi ini.

Pada awal tahun 2020, perekonomian Kota Surakarta mendapat pukulan berat karena dampak penularan virus *Covid 19* atau *Corona* yang memaksa pemerintah Kota Surakarta untuk melaksanakan kebijakan *social* dan *phisycal distancing*. Perekonomian Kota Surakarta juga terdampak karena penularan virus ini membawa dunia menuju resesi ekonomi. Berdasarkan kondisi ini, ada kemungkinan Indeks Daya Saing Tahun 2020 Beberapa dimensi antara lain keuangan daerah, stabilitas ekonomi, pajak dan retribusi, stabilitas pasar, ketenagakerjaan dan akses pasar.

Covid 19 tidak akan berpengaruh banyak terhadap beberapa pondasi dasar Indeks Daya Saing Kota Surakarta. Beberapa pondasi dasar itu antar lain sumber daya manusia, infrastruktur, penguasaan teknologi, kelembagaan dan penelitian pengembangan. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa tercapai. Sumber dari inovasi dan kreatifitas yang menjadi pendorong pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia berkualitas. Kualitas sumber daya manusia ini yang akan menjadi pengungkit kebangkitan ekonomi pasca penularan *Covid 19*.

Istilah daya saing dalam sebuah industry pada dasarnya mengacu pada konsep keunggulan kompetitif dari Porter (1985). Dess et al.,(2005) mengemukakan ada dua mitos yang menghantui perusahaan terkait dengan keunggulan kompetitifnya. Pertama, anggapan bahwa dalam iklim bisnis kontemporer, kesempatan bisnis sudah hilang. Kedua, usaha mikro-kecil dan menengah tidak mungkin bersaing dengan perusahaan besar. Penelitian ini mencoba untuk memecahkan mitos yang kedua.

Keunggulan kompetitif muncul pada saat sebuah perusahaan menemukan cara yang lebih efisien untuk bersaing dalam sebuah industry dan kemudian menyusun strategi dalam bentuk yang konkret berdasarkan temuan tersebut (Passemar dan Kleiner, 2000). Proses inilah yang disebut dengan inovasi. Mendefinisikan sumber inovasi

sama dengan menciptakan keunggulan kompetitif. Passemard dan Kleiner (2000) mengklasifikasikan lima jenis sumber inovasi, yaitu:

1. Teknologi baru.
2. Modifikasi permintaan atau menciptakan permintaan.
3. Munculnya segmen konsumen baru.
4. Perubahan biaya karena adanya perubahan pola produksi.
5. Perubahan regulasi.

Menciptakan keunggulan kompetitif adalah sebuah usaha yang sulit, namun menjaganya tetap di perusahaan adalah usaha yang lebih sulit lagi. Passemard dan Kleiner (2000) menyatakan bahwa pemeliharaan keunggulan kompetitif tergantung dari tiga hal.

1. Sumber keunggulan kompetitif. Ada hierarki diantara keunggulan ini, yaitu keunggulan minor (misalnya: tenaga kerja yang murah) dan keunggulan mayor (misalnya: penguasaan teknologi baru).
2. Jumlah keunggulan kompetitif. Kuncinya semakin banyak sebuah perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif maka semakin baik.
3. Mengubah strategi perusahaan secara terus menerus untuk menuju pada kinerja perusahaan yang terbaik.

Konsep daya saing industri ini yang diadopsi menjadi daya saing negara atau daerah. Daya saing sebuah wilayah, negara atau daerah pada dasarnya adalah mengidentifikasi keunggulan kompetitif sebuah daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam rangka pembangunan ekonomi. Daya saing daerah pada dasarnya adalah beberapa faktor yang membuat sebuah daerah menarik untuk investor.

Porter (1990) menyebutkan bahwa dalam konsep daya saing negara atau daerah ada beberapa faktor penting, yaitu:

1. *Factor Conditions*. Posisi sebuah daerah terkait dengan faktor produksi, seperti infrastruktur dan tenaga kerja terampil yang diperlukan untuk mendukung industri.
2. *Demand Conditions*. Karakteristik dari permintaan rumah tangga di daerah tersebut terhadap produk maupun jasa.
3. *Related and Supporting Industries*. Kondisi dari industri yang berperan sebagai pemasok serta industri terkait lainnya yang kompetitif.
4. *Firm Strategy, Structure and Rivalry*. Kondisi dari regulasi daerah terkait dengan bagaimana industri diatur dan dikelola, serta persaingan antar perusahaan pada level daerah.

Berdasarkan UU No. 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek), Pemerintah baik pusat maupun daerah wajib mengembangkan invensi dan inovasi; melindungi kekayaan intelektual dan pemanfaatannya; menggunakan dan menjamin pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan dalam bentuk invensi dan inovasi untuk pembangunan nasional/daerah. Sisnas Iptek ini yang dijadikan salah satu landasan dasar dalam Program Legislasi Nasional, urusan tentang daya saing dan pengembangan daerah. Pada tahun 2019 penyiapan payung hokum urusan Daya Saing Daerah telah mulai diimplementasikan melalui Rancangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tentang Pengembangan Daya Sing Daerah, diusulkan oleh Dewan Perwakilan Daerah.

Terkait daya saing daerah, dengan mengacu pada sistem penilaian *Global Competitiveness Index* oleh *World Economic Forum*, *The World Competitiveness Yearbook* oleh *Institute for Management Development*, *European Competitiveness Index* oleh *European Commission*, dan Analisis Daya Saing dan Strategi Pembangunan oleh *Asia Competitiveness Institute*, dengan menyesuaikan kondisi dan

kebutuhan masing-masing daerah di Indonesia, maka ditetapkanlah 4 aspek yang diklasifikasikan menjadi 12 pilar. Keempat aspek pokok sebagai acuan pengukuran Indeks Daya Saing Daerah meliputi:

1. Aspek Penguat/*Enabling Environment*: Pilar Kelembagaan, Pilar Infrastruktur, dan Pilar Perekonomian Daerah
2. Aspek Pasar/*Market*: Pilar Efisiensi Pasar Produk, Pilar Ketenagakerjaan, Pilar Akses Keuangan, dan Pilar Ukuran Pasar
3. Aspek Sumber Daya Manusia/*Human Capital*: Pilar Kesehatan dan Pilar Pendidikan & Keterampilan
4. Aspek Ekosistem Inovasi: Pilar Dinamika Bisnis, Pilar Kapasitas Inovasi, dan Pilar Kesiapan Teknologi.

Tabel 1.1 Komponen Daya Saing Daerah Tahun 2020

NO	ASPEK/FAKTOR	PILAR	DIMENSI	JUMLAH INDIKATOR
I	Aspek Faktor Penguat/<i>Enabling Environment</i>	Pilar Kelembagaan	Tata Kelola Pemerintahan	6
			Keamanan dan Ketertiban	2
		Pilar Infrastruktur	Infrastruktur Transportasi	2
			Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan	3
		Pilar Perekonomian Daerah	Keuangan Daerah	4
			Stabilitas Ekonomi	7
II	Aspek Sumber Daya Manusia/<i>Human Capital</i>	Pilar Kesehatan	Kesehatan	8
		Pilar Pendidikan dan Keterampilan	Pendidikan	7
			Keterampilan	4
III	Aspek Pasar/<i>Market</i>	Pilar Efisiensi Pasar Produk	Kompetisi Dalam Negeri	4
			Pajak dan Retribusi	2
			Stabilitas Pasar	2
		Pilar Ketenagakerjaan	Ketenagakerjaan	3
			Kapasitas tenaga kerja	3
		Pilar Akses Keuangan	Akses Keuangan	6

		Pilar Ukuran Pasar	Ukuran Pasar	3
IV	Aspek Ekosistem Inovasi	Pilar Dinamika Bisnis	Regulasi	4
			Kewirausahaan	6
		Pilar Kapasitas Inovasi	Interaksi dan Keberagaman	6
			Penelitian dan Pengembangan (R & D)	9
			Komersialisasi	3
		Pilar Kesiapan Teknologi	Telematika	2
			Teknologi	1

Dari keempat aspek dan keduabelas pilar indeks daya saing daerah tersebut didetailkan lagi menjadi 23 dimensi dan 97 indikator yang dapat diisi dengan data sesuai kondisi daerah masing-masing untuk kemudian dapat dihitung untuk menghasilkan angka indeks daya saing daerah. Semakin tinggi angka indeks daya saing suatu daerah menunjukkan bahwa potensi yang dimiliki oleh daerah tersebut mempunyai daya saing ekonomi yang semakin tinggi pula.

Berdasarkan potensi ekonomi yang dimiliki Kota Surakarta, maka ada beberapa aspek daya saing Kota Surakarta yang perlu dibangun, yaitu sumber daya manusia, infrastruktur, penguasaan teknologi, kelembagaan dan jaringan bisnis. Kualitas sumber daya manusia merupakan kunci yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan bisa tercapai. Sumber dari inovasi dan kreatifitas yang menjadi pendorong pembangunan ekonomi adalah sumber daya manusia berkualitas.

Kajian ini merupakan sebuah riset dengan desain kuantitatif dengan metode dokumentasi dan survei. Metode dokumentasi menggunakan data-data berupa dokumen regulasi dan kebijakan dari berbagai Perangkat Daerah dan metode survei dilakukan untuk

mendapatkan beberapa data primer terkait dengan pilar ukuran pasar, kesiapan teknologi, dinamika bisnis dan kapasitas inovasi.

B. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Kajian Indeks Daya Saing Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 adalah :

1. Mengidentifikasi indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2020.
2. Menganalisis dampak pandemi Covid 19 terhadap Daya Saing Kota Surakarta tahun 2020.
3. Menganalisis dan merekomendasikan kebijakan ekonomi Kota Surakarta untuk mengantisipasi resesi ekonomi global.

C. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat yaitu:

1. Menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan Kota Surakarta terutama yang terkait dengan indeks daya saing.
2. Menjadi dasar bagi Kota Surakarta untuk menawarkan potensi ekonomi Kota Surakarta kepada investor.

D. Sasaran

Adapun sasaran dari kajian ini adalah

1. Memberikan masukan, saran dan rekomendasi bagi peningkatan daya saing daerah Kota Surakarta
2. Mengidentifikasi indeks daya saing daerah Kota Surakarta tahun 2020
3. Membandingkan indeks daya saing daerah Kota Surakarta tahun 2019 dan 2020

E. Ruang Lingkup Penelitian

Adapun ruang lingkup kegiatan penelitian ini adalah

1. Mengidentifikasi indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2020.

2. Menganalisis perbandingan dan trend perubahan indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2019 dan 2020.
3. Menganalisis perkiraan indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2021.
4. Menyusun rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis indeks daya saing Kota Surakarta tahun 2020.
5. Menyusun rekomendasi kebijakan ekonomi Kota Surakarta di masa *Covid 19* dan mengantisipasi resesi ekonomi global.

F. Luaran Penelitian

1. Dokumen indeks daya saing daerah Kota Surakarta tahun 2020
2. Rekomendasi kebijakan terkait dengan hasil analisis indeks daya saing daerah Kota Surakarta tahun 2020.
3. Rekomendasi potensi investasi yang akan ditawarkan kepada investor

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Daya Saing Daerah

Sebuah negara atau sebuah region (Kabupaten/Provinsi) disebut kompetitif jika mengembangkan perusahaan beroperasi untuk berkompetisi dengan penuh keberhasilan dalam perekonomian global dan pada sisi lain mendukung peningkatan upah dan standar kehidupan pada penduduk secara umum. Daya saing tergantung pada produktivitas jangka panjang dimana bangsa atau region memberdayakan sumber daya manusia, modal dan sumber daya alamnya. Produktivitas diukur dari peningkatan upah berkesinambungan (*sustainable wages*), pertumbuhan kesempatan kerja (*job growth*), dan standar hidup (*standar of living*). Daya saing mengandung makna seberapa produktifnya industri sebuah region berkompetisi dalam industri sejenis. Region berkompetisi dalam hal menawarkan sebuah lingkungan yang lebih produktif untuk dunia usaha.

Daya saing merupakan salah satu kriteria untuk menentukan keberhasilan dan pencapaian sebuah tujuan yang lebih baik oleh suatu negara dalam peningkatan pendapatan dan pertumbuhan ekonomi. Daya saing diidentifikasi dengan masalah produktivitas, yakni dengan melihat tingkat output yang dihasilkan untuk setiap input yang digunakan. Meningkatnya produktivitas ini disebabkan oleh peningkatan jumlah input fisik modal dan tenaga kerja, peningkatan kualitas input yang digunakan dan peningkatan teknologi (Porter, 1990 dalam Abdullah, 2002).

Pendekatan yang sering digunakan untuk mengukur daya saing dilihat dari beberapa indikator yaitu keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif, ada juga keunggulan absolut.

Menurut Tarigan (2005:75). Keunggulan komperatif adalah suatu kegiatan ekonomi yang menurut perbandingan lebih menguntungkan bagi pengembangan daerah. Lebih lanjut menurut tarigan (2005:75) istilah *comparative advantage* (keunggulan komparatif) mula-mula dikemukakan oleh David Ricardo (1917). Dalam teori tersebut, Ricardo membuktikan bahwa apabila ada dua negara saling berdagang dan masing-masing negara mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang bagi negara tersebut memiliki keunggulan yang komperatif maka kedua negara tersebut akan beruntung. Ternyata ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting di perhatikan dalam ekonomi regional.

Keunggulan kompetitif adalah suatu keunggulan yang dapat diciptakan dan dikembangkan. Ini merupakan ukuran daya saing suatu aktifitas kemampuan suatu negara atau suatu daerah untuk memasarkan produknya di luar daerah atau luar negeri. Maka dari itu, menurut Tarigan (2005:75) seorang perencana wilayah harus memiliki kemampuan untuk menganalisa potensi ekonomi wilayahnya. Dalam hal ini kemampuan pemerintah daerah untuk melihat sektor yang memiliki keunggulan/kelemahan di wilayahnya menjadi semakin penting. Sektor ini memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor lain untuk berkembang. Pengertian daya saing mulai berkembang setelah Porter (1990) mendefenisikan daya saing nasional: "luaran dari kemampuan suatu Negara untuk berinovasi dalam rangka mencapai, atau mempertahankan posisi yang menguntungkan dibandingkan dengan Negara lain dalam sejumlah sector-sektor kuncinya. Secara eksplisit, Porter (1990) menyatakan bahwa konsep daya saing yang diterapkan pada level

nasional tak lain adalah “produktivitas” yang didefinisikan sebagai nilai output yang dihasilkan oleh tenaga kerja.

Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan BI (PPSK BI) menggunakan definisi “daya saing daerah dalam penelitiannya sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan Internasional”. Daya saing daerah menurut Bank Indonesia didefinisikan sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Konsep dan definisi daya saing daerah yang dikembangkan dalam penelitian tersebut didasarkan pada dua pertimbangan, yaitu: perkembangan perekonomian daerah ditinjau dari aspek ekonomi regional dan perkembangan konsep dan definisi daya saing daerah dari penelitian-penelitian terdahulu.

World Economic Forum (WEF) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan perekonomian nasional untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. *Institute for Management Development* (IMD) mendefinisikan daya saing nasional sebagai kemampuan suatu negara dalam menciptakan nilai tambah dalam rangka menambah kekayaan nasional dengan cara mengelola aset dan proses, daya tarik dan agresivitas, *globality* dan *proximity*, serta model ekonomi dan sosial. *European Commission* mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (*regions*) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal. Konsep daya saing daerah

berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga *World Economic Forum (Global Competitiveness Report)* dan *International Institute for Management Development (World Competitiveness Yearbook)*. Daya saing ekonomi suatu negara seringkali merupakan cerminan dari daya saing ekonomi daerah secara keseluruhan. Disamping itu, dengan adanya tren desentralisasi, maka makin kuat kebutuhan untuk mengetahui daya saing pada tingkat daerah (PPSK BI, 2008).

Daya saing daerah menurut definisi yang dibuat Departemen Perdagangan dan Industri Inggris (UK-DTI) adalah “kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan domestik maupun internasional.” Sementara itu *Centre for Urban and Regional Studies (CURDS)*, Inggris mendefinisikan daya saing daerah sebagai “kemampuan sektor bisnis atau perusahaan pada suatu daerah dalam menghasilkan pendapatan yang tinggi serta tingkat kekayaan yang lebih merata untuk penduduknya.” *The European Commission* mendefinisikan daya saing sebagai “kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa yang sesuai dengan kebutuhan pasar internasional, diiringi dengan kemampuan mempertahankan pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, lebih umumnya adalah kemampuan (regions) untuk menciptakan pendapatan dan kesempatan kerja yang relatif tinggi sementara terekspos pada daya saing eksternal” (European Commission, 1999 p.4. dalam Garnier, Martin dan Tyler, 2004).

Sementara Huggins (2007) mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan dari perekonomian untuk menarik dan mempertahankan perusahaan-perusahaan dengan kondisi

yang stabil atau dengan pangsa pasar yang meningkat dalam aktivitasnya, dengan tetap mempertahankan atau meningkatkan standar kehidupan bagi semua yang terlibat didalamnya.” Dalam pengertian daya saing ini, secara tersirat dinyatakan pula bahwa kondisi perekonomian yang kondusif merupakan suatu syarat mutlak untuk meningkatkan daya saing daerah. Martin dan Tyler (2003) menyebutkan argumen mengapa daerah maupun negara saling berkompetisi:

- a) Untuk investasi, melalui kemampuan daerah untuk menarik masuknya modal asing, swasta, dan modal publik;
- b) Untuk tenaga kerja, dengan kemampuan untuk menarik masuknya tenaga kerja yang terampil, entrepreneur-entrepreneur dan tenaga kerja yang kreatif, dengan cara menyediakan lingkungan yang kondusif dan pasar tenaga kerja domestik.
- c) Untuk teknologi, melalui kemampuan daerah untuk menarik aktivitas inovasi dan transfer ilmu pengetahuan dan teknologi.

Dari konsep dan definisi mengenai daya saing di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara daya saing daerah dan daya saing nasional. Dapat diambil satu kesimpulan bahwa dalam mendefinisikan daya saing perlu diperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- a) Daya saing mencakup aspek yang lebih luas dari sekedar produktivitas atau efisiensi pada level mikro. Hal ini memungkinkan kita lebih memilih mendefinisikan daya saing sebagai kemampuan suatu perekonomian daripada kemampuan sektor swasta atau perusahaan.
- b) Pelaku ekonomi (economic agent) bukan hanya perusahaan, akan tetapi juga rumah tangga, pemerintah, dan lain-lain. Semuanya berpadu dalam suatu sistem ekonomi yang sinergis. Tanpa memungkiri peran besar sector swasta

perusahaan dalam perekonomian, fokus perhatian tidak hanya pada itu saja. Hal ini diupayakan dalam rangka menjaga luasnya cakupan konsep daya saing. Tujuan dan hasil akhir meningkatnya daya saing suatu perekonomian tak lain adalah meningkatnya tingkat kesejahteraan penduduk di dalam perekonomian tersebut. Kesejahteraan (*level of living*) adalah konsep yang maha luas yang pasti tidak hanya tergambarkan dalam sebuah besaran variabel seperti pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi hanya satu aspek dari pembangunan ekonomi dalam rangka peningkatan standar kehidupan masyarakat.

- c) Kata kunci dari konsep daya saing adalah “kompetisi.” Disinilah peran keterbukaan terhadap kompetisi dengan para kompetitor menjadi relevan. Kata “daya saing” menjadi kehilangan maknanya pada perekonomian yang tertutup mempertimbangkan hal-hal diatas, akhirnya PPSK-BI mendefenisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional (Abdullah dkk, 2002).

Meyer-Stamer (2008) menyatakan bahwa secara sistemik daya saing suatu Daerah adalah kemampuan sebuah Daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Daerah tersebut. Berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya yang fokus pada konsep produktivitas, pandangan Meyer didasarkan sepenuhnya pada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang tinggal di suatu Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang erat antara daya saing dan kesejahteraan. Hal tersebut berarti bahwa Daerah yang kompetitif tidak hanya terkait dengan output yang dihasilkan seperti halnya produktivitas, melainkan

berhubungan juga dengan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Bristow, 2005).

Delgado et al. (2012) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat output yang diharapkan per penduduk usia kerja dengan didukung oleh keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Menurut Delgado, faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing adalah: infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dan institusi politik (kualitas institusi politik dan aturan hukum); kebijakan moneter dan fiskal; dan lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik investasi juga memengaruhi daya saing suatu negara.

B. Indikator Utama dan Prinsip Daya Saing Daerah

Banyak faktor yang penentu mendorong produktivitas dan daya saing, memahami faktor dibalik proses ini telah menduduki pikiran ekonom selama ratusan tahun, melahirkan teori-teori mulai dari Adam Smith yang fokus pada spesialisasi dan pembagian kerja, penekanan ekonom neo-klasik pada investasi dalam modal fisik dan infrastruktur, dan yang baru tertarik pada pendidikan, pelatihan, kemajuan teknologi, stabilitas ekonomi makro, tata pemerintahan yang baik, kecanggihan perusahaan, efisiensi pasar dan lain-lain (GCI, 2014). Sementara semua faktor-faktor diatas mungkin penting, dari berbagai literatur, teori ekonomi, serta berbagai diskusi, indikator-indikator utama yang dianggap menentukan daya saing daerah adalah (1) Perekonomian daerah, (2) Keterbukaan, (3) Sistem keuangan, (4) Infrastuktur dan sumber daya alam, (5) Ilmu pengetahuan dan teknologi, (6) Sumber daya manusia, (7) Kelembagaan, (8) Governance dan kebijakan pemerintah, (9) Manajemen dan ekonomi mikro (Abdullah dkk, 2002). Masing- masing indikator diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perekonomian Daerah

Perekonomian daerah merupakan ukuran kinerja secara umum dari perekonomian makro (daerah) yang meliputi penciptaan nilai tambah, akumulasi kapital, tingkat konsumsi, kinerja sektoral perekonomian, serta tingkat biaya hidup. Indikator kinerja ekonomi makro mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip berikut:

- a. Nilai tambah merefleksikan produktivitas perekonomian setidaknya dalam jangka pendek.
- b. Akumulasi modal mutlak diperlukan untuk meningkatkan daya saing jangka panjang.
- c. Kemakmuran suatu daerah mencerminkan kinerja ekonomi di masa lalu.
- d. Kompetisi yang didorong mekanisme pasar akan meningkatkan kinerja ekonomi suatu daerah. Semakin ketat kompetisi pada suatu perekonomian daerah, maka akan semakin kompetitif perusahaan-perusahaan-perusahaan yang akan bersaing secara internasional maupun domestik.

2. Keterbukaan

Keterbukaan merupakan ukuran seberapa jauh perekonomian suatu daerah berhubungan dengan daerah lain yang tercermin dari perdagangan daerah tersebut dengan daerah lain dalam cakupan nasional. Indikator ini menentukan daya saing melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keberhasilan suatu daerah dalam perdagangan internasional merefleksikan daya saing perekonomian daerah tersebut.
- b. Keterbukaan suatu daerah baik dalam perdagangan domestik maupun internasional meningkatkan kinerja perekonomiannya.

- c. Investasi internasional mengalokasikan sumber daya secara efisien ke seluruh penjuru dunia.
- d. Daya saing yang didorong oleh ekspor terkait dengan orientasi pertumbuhan perekonomian daerah.
- e. Mempertahankan standar hidup yang tinggi mengharuskan integrasi dengan ekonomi internasional

3. Sistem Keuangan

Sistem keuangan merefleksikan kemampuan sistem finansial perbankan dan nonperbankan di daerah untuk fasilitasi aktivitas perekonomian yang memberikan nilai tambah. Sistem keuangan suatu daerah akan memengaruhi alokasi faktor produksi yang terjadi di perekonomian daerah tersebut. Indikator sistem keuangan ini mempengaruhi daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Sistem keuangan yang baik mutlak diperlukan dalam memfasilitasi aktivitas perekonomian daerah.
- b. Sektor keuangan yang efisien dan terintegrasi secara internasional mendukung daya saing daerah.

4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam

Dalam hal ini infrastruktur merupakan indikator seberapa besar daya seperti modal fisik, geografis, dan sumber daya alam dapat mendukung aktivitas perekonomian daerah yang bernilai tambah. Indikator ini mendukung daya saing daerah melalui prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Modal fisik berupa infrastruktur baik ketersediaan maupun kualitasnya mendukung aktivitas ekonomi daerah.
- b. Modal alamiah baik berupa kondisi geografis maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya juga mendorong aktivitas perekonomian daerah.
- c. Teknologi informasi yang maju merupakan infrastruktur yang mendukung berjalannya aktivitas bisnis di daerah yang berdaya saing.

5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ilmu pengetahuan dan teknologi mengukur kemampuan daerah dalam ilmu pengetahuan dan teknologi serta penerapannya dalam aktivitas ekonomi yang meningkatkan nilai tambah. Indikator ini mempengaruhi daya saing daerah melalui beberapa prinsip sebagai berikut:

- a. Keunggulan kompetitif dapat dibangun melalui aplikasi teknologi yang sudah ada secara efisien dan inovatif.
- b. Investasi pada penelitian dasar dan aktivitas yang inovatif yang menciptakan pengetahuan baru sangat krusial bagi daerah ketika melalui tahapan pembangunan ekonomi yang lebih maju.
- c. Investasi jangka panjang berupa R&D akan meningkatkan daya saing sektor bisnis.

6. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam hal ini ditujukan untuk mengukur ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia. Faktor SDM ini mempengaruhi daya saing daerah berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

- a. Angkatan kerja dalam jumlah besar dan berkualitas akan meningkatkan daya saing suatu daerah.
- b. Pelatihan dan pendidikan adalah cara yang paling baik dalam meningkatkan tenaga kerja yang berkualitas.
- c. Sikap dan nilai yang dianut oleh tenaga kerja juga menentukan daya saing suatu daerah.
- d. Kualitas hidup masyarakat suatu daerah menentukan daya saing daerah tersebut begitu juga sebaliknya.

7. Kelembagaan

Kelembagaan merupakan indikator yang mengukur seberapa jauh iklim sosial, hukum dan aspek keamanan mampu mempengaruhi secara positif aktivitas perekonomian

di daerah. Pengaruh faktor kelembagaan terhadap daya saing daerah didasarkan pada beberapa prinsip sebagai berikut.

- a. Stabilitas sosial dan politik melalui sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik merupakan iklim yang kondusif dalam mendorong aktivitas ekonomi daerah yang berdaya saing.
- b. Peningkatan daya saing ekonomi suatu daerah tidak akan dapat tercapai tanpa adanya sistem hukum yang baik serta penegakan hukum yang independen.
- c. Aktivitas perekonomian daerah suatu daerah tidak akan dapat berjalan secara optimal tanpa didukung oleh situasi keamanan yang kondusif.

8. Governance dan Kebijakan Pemerintah

Governance dan kebijakan pemerintah dimaksudkan sebagai ukuran dari kualitas administrasi pemerintah daerah, khususnya dalam rangka menyediakan infrastruktur fisik dan peraturan-peraturan daerah. Secara umum pengaruh faktor *governance* dan kebijakan pemerintah bagi daya saing daerah dapat disarikan pada prinsip sebagai berikut:

- a. Dengan tujuan menciptakan iklim persaingan yang sehat, intervensi pemerintah dalam perekonomian sebaiknya diminimalkan.
- b. Pemerintah berperan dalam menciptakan kondisi sosial yang terprediksi serta berperan pula dalam meminimalkan resiko bisnis.
- c. Efektivitas administrasi pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan aturan-aturan berpengaruh terhadap daya saing suatu daerah.
- d. Efektivitas pemerintah dalam melakukan koordinasi dan menyediakan informasi tertentu pada sektor swasta mendukung daya saing ekonomi suatu daerah.

- e. Fleksibilitas pemerintah daerah dalam menyesuaikan kebijakan ekonomi merupakan faktor yang kondusif dalam mendukung.

9. Manajemen dan Ekonomi Mikro

Dalam indikator manajemen dan ekonomi mikro pengukuran yang dilakukan dikaitkan dengan pertanyaan seberapa jauh perusahaan di daerah dikelola dengan cara yang inovatif, menguntungkan dan bertanggung jawab. Adapun prinsip yang relevan terhadap daya saing daerah di antaranya adalah:

- a. Rasio harga/kualitas yang kompetitif dari suatu produk mencerminkan kemampuan managerial perusahaan-perusahaan yang berada di suatu daerah.
- b. Orientasi jangka panjang manajemen perusahaan akan meningkatkan daya saing daerah di mana perusahaan tersebut berada.
- c. Efisiensi dalam aktivitas perekonomian ditambah dengan kemampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam keharusan bagi perusahaan yang kompetitif.
- d. Kewirausahaan sangat krusial bagi aktivitas ekonomi pada masa-masa awal.
- e. Dalam usaha yang sudah mapan, manajemen perusahaan memerlukan keahlian dalam mengintegrasikan serta membedakan kegiatan-kegiatan usaha.

C. Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta

Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta yang tercantum dalam RPJMD tahun 2016 - 2021 yang terkait dengan isu strategis.

1. Isu Strategis Bidang Infrastruktur

- a) Pengembangan infrastruktur sesuai kebutuhan fungsional

- b) Pengembangan transportasi perkotaan yang terintegrasi dengan kawasan komersil atau perumahan, serta peningkatan keselamatan dan keamanan transportasi
- c) Pemenuhan akses sanitasi, air bersih dan penataan kawasan kumuh (program 100-0-100) serta pengurangan rumah tidak layak huni
- d) Pengurangan pencemaran lingkungan dan antisipasi perubahan iklim
- e) Penguatan kewaspadaan dini masyarakat terhadap berbagai ancaman bencana

2. Isu Strategis Bidang Pemerintahan

- a) Perencanaan pembangunan dan produk kebijakan yang modern, efektif, dan efisien berbasis data dan hasil kajian yang akurat dan terbaru serta berperspektif kependudukan
- b) Pemanfaatan IPTEK dan Hasil Inovasi secara berkelanjutan menuju *Smart Urban Services* dan *Smart Culture*
- c) Peningkatan Reformasi Birokrasi
- d) Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah
- e) Pengembangan Satu Data dalam penyelenggaraan data & informasi Pembangunan daerah
- f) Akselerasi Pengembangan *smart governance* dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan publik dan administrasi perkantoran
- g) Pemekaran wilayah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik
- h) Penguatan Tata Kelola Keamanan Informasi

- i) Peningkatan kualitas pelayanan perpustakaan berstandar nasional dalam mendukung minat baca masyarakat
- j) Digitalisasi arsip dan tata kelola arsip sesuai standar baku
- k) Penguatan fungsi legislasi dalam pengelolaan kota dengan memanfaatkan teknologi informasi

3. Isu Strategis Bidang Sosial Budaya

- a) Optimalisasi pemerataan akses dan kualitas pendidikan sepanjang hayat
- b) Penguatan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- c) Pengembangan pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing
- d) Pengembangan seni budaya sebagai atraksi wisata dan pelestarian nilai-nilai budaya
- e) Penguatan pengarusutamaan gender, pemenuhan hak anak, perlindungan perempuan dan anak
- f) Penegakan perda yang konsisten dan berkelanjutan
- g) Penanganan PMKS secara menyeluruh dan paripurna
- h) Penguatan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang modern, cepat dan efektif secara daring.
- i) Peningkatan partisipasi KB
- j) Penguatan keswadayaan masyarakat dalam berbagai program pembangunan

4. Isu Strategis Bidang Ekonomi

- a) Penguatan daya saing tenaga kerja untuk merespon kebutuhan pasar kerja

- b) Penguatan Daya saing wisata, Pengembangan Pariwisata MICE, dan Wisata Kuliner dan Belanja (WISKULJA) sebagai wisata Gastronomi dunia
- c) Peningkatan daya saing investasi dan sistem perijinan yang prima
- d) Pengembangan ekonomi kreatif dan penguasaan teknologi
- e) Penguatan Perdagangan berbasis Digital (*E-Commerce*)
- f) Penguatan keterjaminan ketersediaan pangan seiring dengan peningkatan populasi penduduk
- g) Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM
- h) Peningkatan konsumsi ikan di masyarakat
- i) Penguatan pengawasan peredaran produk pangan yang tidak aman dan tidak sehat
- j) Optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian
- k) Optimalisasi program transmigrasi

BAB III

METODOLOGI

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif. Pendekatan kuantitatif yang digunakan adalah dengan metode survei. Dalam penelitian survei, informasi dikumpulkan dari responden dengan menggunakan kuesioner. Metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Oleh karena itu, penelitian ini akan dilaksanakan dengan menggunakan kuesioner terstruktur. Desain penelitian survei yang dipergunakan dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang kondisi ketenagakerjaan dan penerapan teknologi dalam praktek bisnis di Kota Surakarta.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah dinas dan lembaga, serta stakeholder yang relevan dengan pengukuran indeks daya saing daerah di Kota Surakarta. Metode pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling*.

C. Alat Analisis

Kajian ini menggunakan alat analisis sebagai berikut:

1. Statistik deskriptif.

Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi Sugiono (2005:142).

2. Analisis Indeks Daya Saing Daerah

Mengukur tingkat daya saing daerah berdasarkan komponen daya saing daerah tahun 2020 diukur dengan 4 Aspek, 23 Dimensi dan 12 pilar serta 97 indikator.

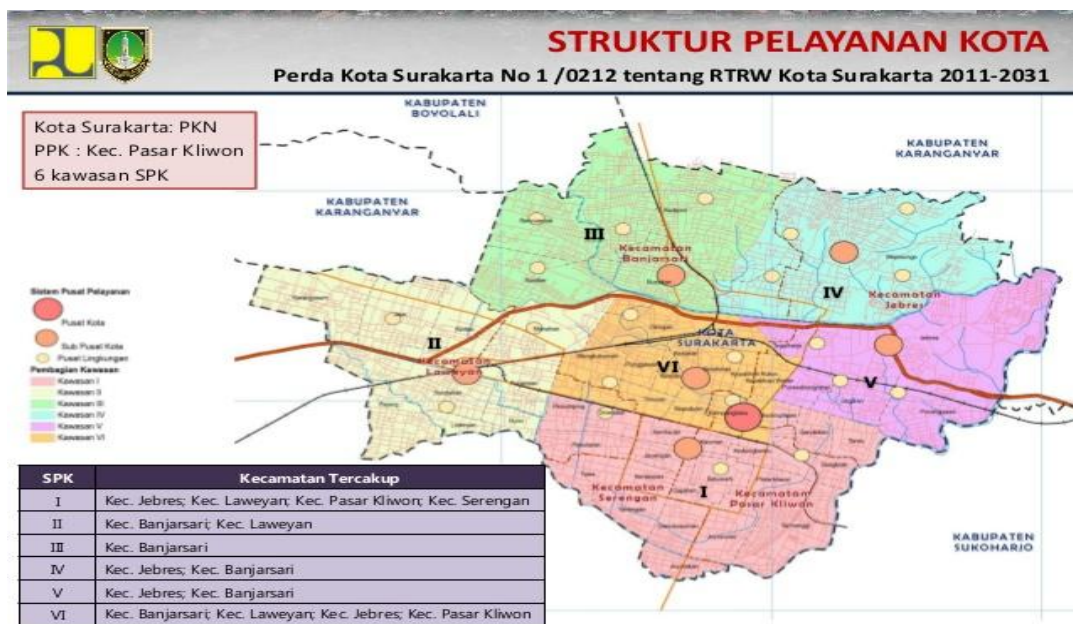
BAB IV

GAMBARAN UMUM KOTA SURAKARTA

A. Kondisi Administrasi Wilayah

Kota Surakarta merupakan kota madya yang mengalami perkembangan yang pesat menuju kota modern. Dilihat dari letak geografis, Kota Surakarta memiliki wilayah dengan posisi strategis yang dilalui dua perlintasan jalur utama menghubungkan antara bagian barat dan timur Pulau Jawa di lintas selatan. Luas wilayah dengan besar 44,04 Km² (0,14 % dari luas Jawa Tengah).

Gambar 4.1 Peta Kota Surakarta



Sumber : Bagian Pemerintah Umum Setda Kota Surakarta, 2020

Perbatasan administrasi wilayah Kota Surakarta, menurut RTRW Kota Surakarta tahun 2011-2031 adalah sebagai berikut:

- Batas Utara : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali
- Batas Selatan : Kabupaten Sukoharjo

- Batas Timur : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar
- Batas Barat : Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar

Secara rinci pembagian wilayah administrasi di Kota Surakarta dapat dilihat dalam tabel 4.1. berikut ini.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administrasi Kota Surakarta

Kecamatan	Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	RW	RT	KK
Laweyan	11	8,64	105	458	32.777
Serengan	7	3,19	72	312	18.007
Pasar Kliwon	10	4,82	101	437	27.695
Jebres	11	12,58	153	649	47.302
Banjarsari	15	15,81	195	930	57.763
Jumlah	54	44,04	626	2.786	183.544

Sumber: BPS Kota Surakarta (2020)

Kota Surakarta terdiri dari 5 kecamatan, 54 kelurahan, 626 RW dengan jumlah RT sebanyak 2.786. Kecamatan Banjarsari memiliki wilayah yang paling luas, yaitu 15,81 km² dan Kecamatan Serengan memiliki wilayah paling kecil, yaitu 3,19 km². Dengan kondisi ini, Kecamatan Banjarsari memiliki kelurahan terbanyak yaitu 13 kelurahan, dan paling sedikit di Kecamatan Serengan, yaitu sebanyak 7 kelurahan. Jumlah RW terbanyak terdapat di Kecamatan Banjarsari yaitu sebanyak 195 dengan jumlah RT sebanyak 930. Jumlah RW dan RT yang paling kecil adalah Kec, Serengan yaitu sebanyak 72 RW dan 312 RT.

B. Kondisi Geografis

Kota Surakarta secara geografis berada antara 110°45'15"-110°45'35" Bujur Timur dan 7°36'00"- 7°56'00" Lintang Selatan. Kota Surakarta merupakan salah satu kota besar di Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang menunjang kota-kota lainnya seperti Semarang maupun Yogyakarta. Kota Surakarta atau lebih dikenal dengan "Kota Solo" termasuk daerah dataran rendah yang memiliki ketinggian antara ±92 meter diatas permukaan laut dan kemiringan lahan antara 0% hingga 15%. Berikut adalah tabel yang menunjukkan kondisi topografi Kota Surakarta ditinjau dari ketinggian dan kemiringan lahan tiap kecamatan.

Tabel 4.2. Kondisi Topografi Kota Surakarta

Kecamatan	Ketinggian Tempat (m dpl)	Kemiringan Tanah
Kec. Laweyan	90 – 100	0 – 2 %
Kec. Serengan	80 – 100	0 – 2 %
Kec. Pasar Kliwon	80 – 95	0 – 2 %
Kec. Jebres	90 – 120	2 – 15%
Kec. Banjarsari	85 – 100	0 – 2 %
Kota Surakarta	80 - 120	0 – 15%

Sumber: BPS Kota Surakarta (2020)

Kota Surakarta tergolong dalam iklim tropis, yaitumemiliki bulan kering mencapai 5 bulan (Mei-September) dan bulan basah sebanyak 7 bulan (Oktober-April)dengan dengan suhu rata-rata 24,8°C sampai 18,1°C. Tingkat Kelembaban tergolong sedang yaitu berkisar antara 66-84%. Sedangkanpenyinaran matahari di Kota Surakarta tertinggi terjadi pada bulan Agustus atau September dengan radiasi matahari antara 80–84%, sementara penyinaran terendah terjadi pada bulan Desember atau Januari dengan radiasi

matahari sekitar 48 – 50%. Tekanan udara antara 1.007-1011 atmosfir, rata-rata sebesar 1.010 atmosfir. Kondisi Curah hujan pada tahun 2011 sebesar 2.548,50 mm/th, lebih rendah dibandingkan tahun 2010 sebesar 3.408 mm/thn dan tahun 2009 sebesar 2.332,5 mm/th.

C. Kondisi Rencana Struktur Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Surakarta tahun 2011-2031 dijelaskan bahwa Kota Surakarta memiliki satu Pusat Pelayanan Kota (PPK) yang membawahi 6 Sistem Pusat Pelayanan Kota.

Tabel 4.3. Pembagian Sistem Pusat Pelayanan Kota Surakarta Tahun 2011-2031

No	Sub Pusat Pelayanan Kota	Kecamatan Tercakup	Arah Fungsi Kawasan
1	I	Kec. Jebres, Laweyan, Pasar Kliwon, Serengan	Pariwisata Budaya, Perdagangan dan jasa, olahraga, Industri kreatif
2	II	Kec. Banjarsari, dan Laweyan	Pariwisata, olahraga, Industri kreatif
3	III	Kec. Banjarsari	Permukiman, perdagangan dan jasa
4	IV	Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres	Permukiman, perdagangan dan jasa, Industri kecil dan industri ringan
5	V	Kec. Banjarsari dan Kec. Jebres	Pariwisata, Pendidikan Tinggi, Industri kreatif
6	VI	Kec. Banjarsari, Kec. Jebres, Kec. Laweyan	Pemerintahan, Pariwisata budaya, Perdagangan dan Jasa

Sumber: RTRW Kota Surakarta, 2011-2031

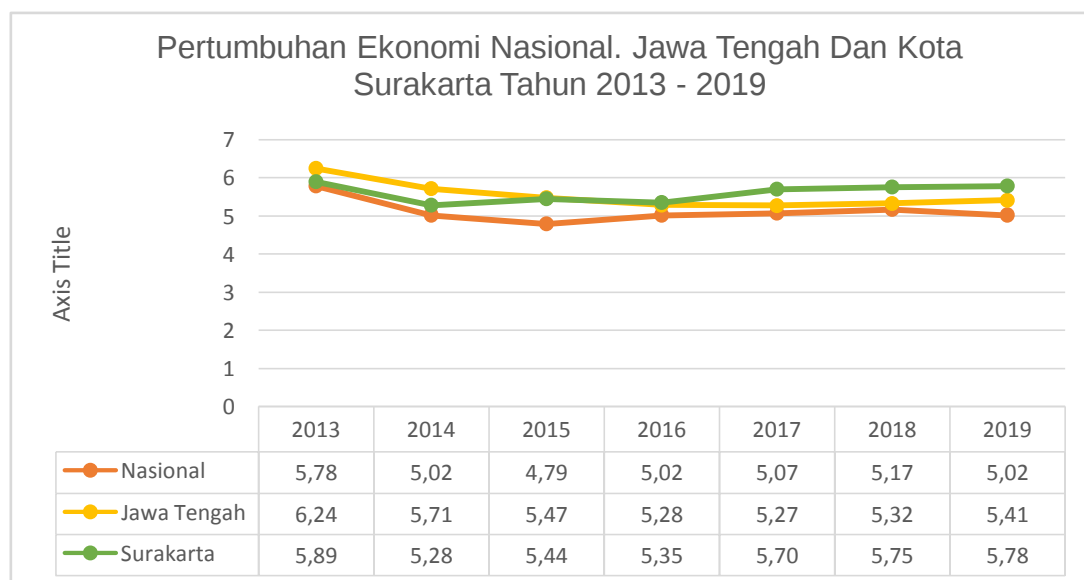
D. Kondisi Perekonomian Daerah

Kondisi ekonomi daerah dan kinerja pembangunan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu dapat dilihat dari

nilai dan sebaran PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar, sebagai contoh perhitungan PDRB di Indonesia menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2010.

PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga. Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta terlihat fluktuasi, meskipun nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan nasional sebagaimana terlihat dalam grafik di bawah ini.



Gambar 4.2. Pertumbuhan Ekonomi Kota Surakarta, Provinsi Jateng dan Nasional Tahun 2013 Sampai dengan 2019

Pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta dalam rentang waktu tahun 2013 sampai dengan 2019 menunjukkan fluktuatif. Penurunan pertumbuhan ekonomi setelah tahun 2012 terendah pada tahun 2014 sebesar 5,28. Pada tahun 2017 dan 2018 mengalami tren kenaikan yaitu sebesar 0,5%. Nilai tahun 2018 mengalami kenaikan kembali sebesar 0,3%. Jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah, pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015 pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta masih dibawah Jawa Tengah, sedangkan setelah tahun 2016 sampai dengan 2018 masih lebih tinggi. Jika dibandingkan dengan Nasional pertumbuhan ekonomi Kota Surakarta masih lebih tinggi.

Pada tahun 2019 sektor primer di Kota Surakarta terdiri dari sektor pertanian, pertambangan dan penggalan memberikan sumbangan total mencapai Rp. 234,24 milyar. Sektor sekunder dengan sektor industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, konstruksi memberikan kontribusi total sebesar Rp. 17.234,76 miliar. Pada tahun 2015–2019 sektor tersier memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan PDRB Kota Surakarta sangat fluktuatif. PDRB sektor tersier merupakan sektor ekonomi yang berkaitan dengan nilai tambah yang diperoleh dari proses pengolahan informasi, daya cipta, organisasi dan koordinasi antar manusia sehingga tidak memproduksi dalam bentuk fisik melainkan dalam bentuk jasa. Sektor ini meliputi lapangan usaha perdagangan, restoran, hotel, angkutan, keuangan, komunikasi, dan jasa-jasa. Sedangkan sektor tersier mendominasi struktur ekonomi terhadap PDRB Kota Surakarta pada tahun 2019. Sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan dan jasa perusahaan dan jasa-jasa memberikan sumbangan terhadap PDRB Kota Surakarta secara keseluruhan mencapai Rp. 24.303,91 miliar.

Apabila PDRB dihitung atas dasar harga konstan Tahun 2010, kinerja sektor tersier terus mengalami penurunan dari 9,26

persen menjadi 9,18 persen. Kondisi ini dipengaruhi oleh penurunan dari lapangan usaha sektor perdagangan, hotel dan restoran. Terbakarnya Pasar Klewer turut memberikan kontribusi pada penurunan PDRB terutama perdagangan.

Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2019 tercatat sebesar Rp. 35.738,19 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 33.506,23 miliar. Secara kumulatif peningkatan PDRB ADHK 2010 dari tahun 2015 ke tahun 2019 mencapai Rp 13.032,70 miliar. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Kota Surakarta. Laju pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir mulai membaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir adalah 5,504%

Tabel 4.4. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Kota Surakarta Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	182,75	195,99	204,86	219,28	233,44
B	Pertambangan dan Penggalian	0,77	0,78	0,80	0,80	0,80
C	Industri Pengolahan	3.002,99	3.254,99	3.494,99	3.755,20	4.060,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	64,96	74,05	82,62	89,45	94,47
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	55,29	57,52	61,51	64,54	68,56
F	Konstruksi	9.410,74	10.191,82	10.991,14	12.059,89	13.011,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.889,99	8.491,04	9.172,70	9.840,82	10.635,52
H	Transportasi dan Pergudangan	936,40	991,64	1.063,36	1.133,74	1.241,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2.015,81	2.203,00	2.322,96	2.438,52	2.596,80
J	Informasi dan Komunikasi	3.715,66	3.495,72	4.623,42	5.182,97	5.764,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.310,07	1.456,90	1.592,35	1.704,37	1.805,30
L	Real Estate	1.436,44	1.555,46	1.673,99	1.760,87	1.846,24
M,N	Jasa Perusahaan	272,95	307,94	332,37	372,42	414,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.086,16	2.250,74	2.351,65	2.459,81	2.594,39
P	Jasa Pendidikan	1.877,50	2.017,34	2.228,48	2.425,95	2.643,71
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	385,68	416,39	453,53	499,08	535,37
R,S,T,U	Jasa lainnya	326,20	360,30	391,61	422,26	456,68
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	34.970,36	37.321,62	41.042,34	44.429,97	48.003,06

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

Kinerja perekonomian saat ini dapat dilihat pada tabel 3.3 yaitu PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) dari tahun 2015-2019. Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga berlaku mengalami peningkatan pada setiap tahun. PDRB ADHB pada tahun 2015 tercatat 34.970,36 miliar rupiah kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi sebesar 37.321,62 miliar rupiah. Pada tahun 2018 PDRB ADHB Kota Surakarta mencapai 37.321,62 miliar rupiah, meningkat dari tahun 2017 yang tercatat sebesar 41.042,34 miliar rupiah. Peningkatan terus berlanjut hingga pada tahun 2019, PDRB ADHB Kota Surakarta mencapai 48.003,06 miliar rupiah.

Kinerja perekonomian Kota Surakarta selama lima tahun terakhir dapat dilihat dari PDRB atas dasar harga konstan. Nilai PDRB Kota Surakarta berdasarkan harga konstan 2010 (ADHK 2010) menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. PDRB ADHK pada tahun 2019 tercatat sebesar 35.738,19 miliar rupiah, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 33.506,23 miliar rupiah. Angka PDRB dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dengan berbagai variasi. Hal ini dapat dimaklumi karena ada kebijakan-kebijakan yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap kondisi perekonomian Kota Surakarta. Laju pertumbuhan ekonomi dua tahun terakhir mulai membaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun terakhir adalah 5,78%.

Berdasarkan distribusi persentase PDRB menurut lapangan usaha Kota Surakarta tahun 2015-2019, dari 17 sektor-sektor penyusun PDRB tersebut kontribusi per sektoral didominasi oleh sektor konstruksi, sektor perdagangan besar dan eceran, dan sektor komunikasi dan informasi. Pada tahun 2019, kontribusi sektor konstruksi menyumbang 27,11%, sektor perdagangan besar dan eceran sebesar 22,16%, dan sektor komunikasi dan informasi sebesar 12,01%.

Tabel 4.5. PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Kota Surakarta Tahun 2015-2019 (miliar rupiah)

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018*	2019**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	129,93	131,45	136,49	141,98	146,20
B	Pertambangan dan Penggalian	0,54	0,53	0,53	0,52	0,51
C	Industri Pengolahan	2.263,99	2.348,38	2.450,41	2.556,98	2.707,25
D	Pengadaan Listrik dan Gas	65,09	69,16	72,11	75,71	79,65
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	49,45	50,64	53,82	56,32	58,99
F	Konstruksi	7.390,40	7.865,55	8.273,64	8.688,09	9.090,51
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.723,42	7.033,10	7.432,99	7.800,99	8.205,09
H	Transportasi dan Pergudangan	816,51	859,86	908,89	960,62	1.030,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.463,05	1.538,03	1.605,81	1.672,61	1.759,78
J	Informasi dan Komunikasi	3.723,08	3.951,53	4.368,73	4.897,77	5.393,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	965,84	1.042,31	1.094,71	1.131,38	1.476,58
L	Real Estate	1.249,07	1.329,67	1.398,27	1.433,84	1.476,56
M,N	Jasa Perusahaan	207,53	224,93	234,95	256,24	280,67
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.623,47	1.661,47	1.682,11	1.732,86	1.800,42
P	Jasa Pendidikan	1.223,37	1.273,57	1.333,73	1.411,14	1.495,59
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	285,59	305,89	328,18	357,00	379,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	273,17	289,80	310,10	332,18	356,88
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	28.453,50	29.975,87	31.685,47	33.506,23	35.738,19

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

Tabel 4.6. Distribusi Persentase PDRB Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha /Industry	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,52	0,52	0,5	0,49	0,49
B	Pertambangan dan Penggalian	0	0	0	0	0
C	Industri Pengolahan	8,58	8,62	8,52	8,45	8,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,19	0,20	0,2	0,2	0,2
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,16	0,15	0,15	0,15	0,14
F	Konstruksi	26,91	26,98	26,78	27,14	27,11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	22,56	22,48	22,35	22,15	22,16
H	Transportasi dan Pergudangan	2,68	2,63	2,59	2,55	2,59
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,76	5,83	5,66	5,49	5,41
J	Informasi dan Komunikasi	10,63	10,45	11,27	11,67	12,01
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,75	3,86	3,88	3,84	3,76
L	Real Estate	4,11	4,12	4,08	3,96	3,85
M,N	Jasa Perusahaan	0,78	0,82	0,81	0,84	0,86
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,97	5,96	5,73	5,54	5,4
P	Jasa Pendidikan	5,37	5,33	5,43	5,46	5,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,10	1,1	1,11	1,12	1,12
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,93	0,95	0,95	0,95	0,95
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

Distribusi presentase PDRB menurut lapangan usaha dari tahun 2015-2019 banyak didominasi oleh sektor konstruksi, perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor dengan nilai lebih dari 20% pada tahun 2019. Diatas angka 10 yaitu 12,01 bersumber dari sektor informasi dan komunikasi. Laju pertumbuhan PDRB ADHK menurut lapangan usaha dengan angka tertinggi pada sektor informasi dan komunikasi yaitu 10,12%, jasa perusahaan 9,53% dan transportasi pergudangan sebesar 7,32%.

Tabel 4.7. Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Seri 2010 Menurut Lapangan Usaha Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Kategori	Lapangan Usaha /Industry	2015	2016	2017	2018	2019
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,80	1,17	3,84	4,02	2,97
B	Pertambangan dan Penggalian	-2,62	-0,44	-0,39	-1,58	-2,22
C	Industri Pengolahan	3,66	3,73	4,34	4,35	5,58
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,51	6,24	4,27	4,99	5,21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,77	2,40	6,28	4,64	4,74
F	Konstruksi	5,36	6,43	5,19	5,01	4,63
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4,11	4,61	5,69	4,95	5,18
H	Transportasi dan Pergudangan	8,38	5,31	5,70	5,69	7,32
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,18	5,12	4,41	4,16	5,21
J	Informasi dan Komunikasi	6,67	6,14	10,56	12,11	10,12
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,41	7,92	5,03	3,35	4,44
L	Real Estate	7,22	6,45	5,16	2,54	2,98
M,N	Jasa Perusahaan	9,28	8,38	4,46	9,06	9,53
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,46	2,34	1,24	3,02	3,90
P	Jasa Pendidikan	6,85	4,10	4,72	5,80	5,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	7,11	7,29	8,78	6,19
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,09	6,09	7,01	7,12	7,44
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,44	5,35	5,70	5,75	5,78

Sumber: BPS Kota Surakarta, 2020

E. Kependudukan

Jumlah penduduk Kota Surakarta mengalami pertumbuhan dengan sebaran dan pertumbuhan di setiap kecamatan seperti terlihat dalam table dibawah ini.

Tabel 4.8 Jumlah penduduk Kota Surakarta Tahun 2015-2019

Kecamatan	Penduduk (ribu)					Laju Pertumbuhan Penduduk Th. 2018-2019
	2015	2016	2017	2018	2019	
Laweyan	88.278	88.614	88.947	100.664	102.524	0,64
Serengan	44.781	44.950	451.19	53.643	54.671	0,64
Pasar Kliwon	76.184	76.474	76.760	86.144	86.890	0,63
Jebres	141.614	142.152	142.686	144.551	147.694	1,12
Banjarsari	161.369	161.981	162.590	178.812	183.451	1,29
Kota Surakarta	512.226	514.171	516.102	563.814	575.230	0,97

Sumber: Surakarta dalam angka, 2020

Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2018-2019 mencapai 0,97 persen. Kepadatan penduduk Kota Surakarta sebesar pada tahun 2019 sebesar 13.061,53 per km². Pencari kerja terdaftar perempuan sebanyak 970 jiwa dan laki-laki berjumlah 1.462 jiwa. Jumlah pencari kerja tidak sebanding dengan lowongan kerja terdaftar yang hanya berjumlah 1171. Hal ini yang membutuhkan perhatian semua pihak, dimana jumlah kualitas SDM yang dibutuhkan oleh perusahaan perlu ditingkatkan dan jumlah lowongan pekerjaan dapat didorong melalui program kewirausahaan yang inovatif.

Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2019 berjumlah 575.230 jiwa. Setiap tahun jumlah penduduk Kota Surakarta selalu mengalami kenaikan. Jumlah penduduk tahun 2018 yaitu 563.814 jiwa lebih tinggi dibandingkan tahun 2017 sebanyak 516.102 jiwa. Diantara 5 kecamatan di Kota Surakarta yang memiliki penduduk paling banyak adalah Kecamatan Banjarsari berjumlah 183.451 jiwa, sedangkan kecamatan dengan jumlah penduduk paling sedikit yaitu Kecamatan Serengan (54.671 jiwa).

Kota Surakarta dengan aktivitas bisnis dan sebagai pusat pertumbuhan wilayah sekitarnya, menjadi daya tarik bagi penduduk wilayah lain yang berdekatan untuk datang. Kota Surakarta dengan kemajuannya memiliki kelengkapan fasilitas sehingga mampu menyediakan lapangan pekerjaan, fasilitas pendidikan dan tempat aktivitas bisnis terutama sektor perdagangan. Pergerakan penduduk sekitar yang datang ke Kota Surakarta turut menyumbang kepadatan pada pagi sampai dengan sore hari. Jumlah penduduk Kota Surakarta pada siang hari mencapai 2,5 juta orang karena adanya pergerakan masyarakat di sekitar Kota Surakarta yang melakukan aktivitas sebagai pekerja dan pegawai 47%, sebagian melakukan aktivitas pendidikan sebanyak 27% dan yang melakukan aktivitas belanja sebanyak 26%. Daerah di sekitar Kota Surakarta yang menjadi penyumbang pergerakan manusia dan pintu masuk antara lain kecamatan Kartasura, Kecamatan Bekonang, Kecamatan Grogol (Kab. Sukoharjo), Kecamatan Colomadu dan Palur (Kab. Karanganyar), serta beberapa wilayah di Kabupaten Boyolali.

Penduduk yang melakukan perjalanan ke Kota Surakarta merupakan penduduk dengan usia produktif dengan tujuan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dengan bekerja di Kota terdekat. Mereka memilih Kota Surakarta sebagai kota terdekat dan mudah diakses dengan transportasi pribadi. Adapun tujuan wilayah bekerja para penduduk pinggiran adalah wilayah Kota Surakarta

bagian selatan dan tengah. Selain itu wilayah selatan dan tengah merupakan pusat perdagangan dan jasa sehingga banyak aktivitas bisnis dan perdagangan. Sedangkan wilayah timur merupakan tujuan mendapatkan fasilitas pendidikan seperti universitas dan sekolah tinggi.

Tabel 4.9. Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta Tahun 2019

No	Kecamatan	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk
1	Laweyan	17,23	10.364,24
2	Serengan	8,74	14.239,50
3	Pasar Kliwon	14,87	16.033,20
4	Jebres	27,65	11.418,92
5	Banjarsari	31,50	11.052,40
		100	11.798,07

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2020

Kecamatan Pasar Kliwon memiliki wilayah 4,82 Km² dihuni sebanyak 27.695 Kepala Keluarga (14,87%) dengan kepadatan penduduk pada tahun 2019 mencapai 16.033,20 merupakan wilayah terpadat di Kota Surakarta. Kecamatan Serengan menjadi wilayah terpadat kedua dengan luas wilayah 3,19 Km² dihuni Kepala Keluarga (8,74%) dan kepadatan penduduk mencapai 14.239,50. Kecamatan Laweyan merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah dengan luas wilayah 8,64 Km² jumlah Kepala keluarga yang tinggal sebanyak 32.777 (17,23%) dan tingkat kepadatan mencapai 10.364,24.

Tabel 4.10. Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Menurut Kecamatan di Kota Surakarta 2010 – 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (ribu)				Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun	
		2010	2017	2018	2019	2010- 2019	2018-2019
1	Laweyan	86.208	88.947	100.664	102.524	0,435	0,328
2	Serengan	43.731	451.19	53.643	54.671	0,435	0,329
3	Pasar Kliwon	74.396	76.760	86.144	86.890	0,435	0,328
4	Jebres	138.292	142.686	144.551	147.694	0,435	0,328
5	Banjarsari	157.584	162.590	178.812	183.451	0,435	0,328
	Kota Surakarta	500.211	516.102	563.814	575.230	0,435	0,328

Sumber: Kota Surakarta Dalam Angka Tahun 2020

Laju pertumbuhan penduduk di Kota Surakarta pada tahun 2017–2019 di masing–masing kecamatan tidak jauh berbeda sehingga jumlah pertumbuhan penduduk relative sama. Terlihat dari tabel diatas laju pertumbuhan dimasing masing kecamatan sekitar antara 0,328.

BAB V

ANALISIS DAYA SAING DAERAH

A. KEADAAN TERKINI

1. Identifikasi Peluang/ Kendala dan Inventarisasi Urgensi

Kota Surakarta yang sering dikenal dengan Kota Solo telah berkembang sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan berbagai atribut kota yang melekat seperti kota budaya, pariwisata, jasa, vokasi dan berbagai atribut lain. Kota Surakarta juga dikenal dengan sebutan Solo *The Spirit of Java*, Solo *City of Batik* dan Solo *City of Charm*. Keragaman atribut kota itu menggambarkan besarnya potensi dan tingkat keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan di kota Surakarta.

Kota Surakarta dalam hal potensi wilayah, kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi sektor primer. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa pendidikan. Struktur perekonomian ini dapat dilihat dari indikator kontribusi sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kota Surakarta. Kuatnya sektor tersier dalam struktur PDRB, tidak lepas dari sumber daya Kota Surakarta yang diuntungkan dari aspek lokasi sebagai sumber daya strategis Kota Surakarta. Secara umum beberapa sektor potensial yang menjadi andalan Kota Surakarta antara lain:

a) Perdagangan dan Jasa

Produk yang diperdagangkan antara lain produk tekstil dan hasil kerajinan. Sedangkan perkembangan subsektor hotel dan restoran merupakan faktor pendukung bagi perkembangan sektor perdagangan dan wisata. Sedangkan jasa terkenal yang dijual oleh Kota Surakarta mengakomodasi pengunjung yang ingin singgah, mengadakan pertemuan atau rapat dengan jumlah hotel berbintang

maupun nonbintang. Oleh karena itu sektor jasa bidang *meeting, incentive, conference*, dan *exhibition* (MICE).

b) Industri

Perkembangan sektor industri di Kota Surakarta, dimasa yang akan datang dititikberatkan pada industri rumah tangga dan industri kreatif. Sampai dengan tahun 2018 jumlah industri kecil di Surakarta mencapai 1.673 industri, sedang industri besar sebanyak 72, dan menengah terdapat 190 industri, serta industri kreatif sebanyak 497 dan nonformal sebanyak 6.010 unit usaha, dengan tenaga kerja yang terserap dari sektor ini berjumlah 74.164 orang. Dari beberapa jenis industri yang ada di Kota Surakarta terdapat produk unggulan yaitu; usaha konveksi, yang terdiri dari usaha pembatikan dan pakaian jadi.

c) Wisata

Potensi lain yang dimiliki oleh Kota Surakarta adalah potensi wisata, potensi wisata yang ada di Kota Surakarta berupa wisata budaya yang lebih mendominasi karena wilayah Kota Surakarta masih terdapat sebuah kerajaan dan terdapat beberapa peninggalan sejarah. Wisata budaya itu sendiri merupakan salah satu jenis kegiatan pariwisata yang menggunakan kebudayaan sebagai objeknya. Beberapa event wisata berskala internasional meliputi Solo *International Performing Arts* (SIPA), Indonesia Menari, Festival Keroncong Solo, dan Festival Topeng. Surakarta juga memiliki destinasi sejarah dan budaya ikonik termasuk Taman Balekambang, Benteng Vastenburg, Taman Sriwedari, dan Keraton Kasunanan.

2. Analisis Shift Share dan Location Quotient (LQ)

Berdasarkan Sektor Usaha, terdapat beberapa usaha yang berperan bagi PDRB Kota Surakarta dan termasuk ke dalam sektor basis, serta terdapat beberapa sektor usaha nonbasis.

Tabel Matriks 5.1
Hasil Analisis *Shift Share* dan *Location Quotient* (LQ)

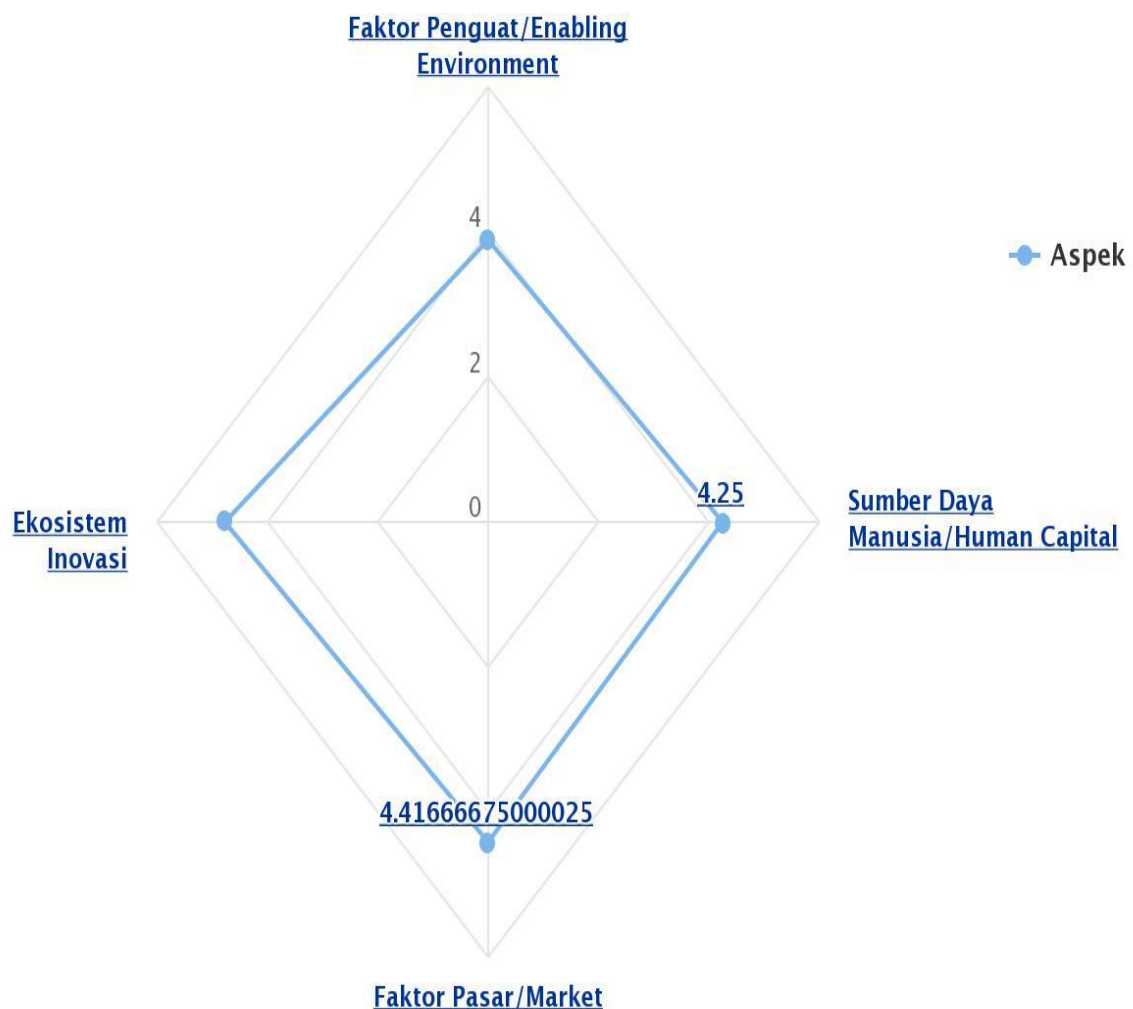
Kategori	Lapangan Usaha	Shift-Share	Rerata	LQ
			LQ (2015-2019)	
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	+	0,033	NB
B	Pertambangan dan Penggalian	-	0,001	NB
C	Industri Pengolahan	+	0,224	NB
D	Pengadaan Listrik dan Gas	+	2,079	B
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	+	2,412	B
F	Konstruksi	+	2,508	B
G	Perdagangan Besar dan Eceran;			
	Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	+	1,612	B
H	Transportasi dan Pergudangan	+	0,848	NB
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	+	1,559	B
J	Informasi dan Komunikasi	+	3,043	B
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	+	1,247	B
L	Real Estate	+	2,296	B
M,N	Jasa Perusahaan	+	2,019	B
O	Administrasi Pemerintahan,			
	Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	+	2,034	B
P	Jasa Pendidikan	+	1,107	B
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	+	1,230	B
R,S,T,U	Jasa Lainnya	+	0,594	NB

Sumber: Hasil Perhitungan *Shift Share* dan LQ, 2020

Sektor Informasi dan Komunikasi dalam rentang 2015-2019 merupakan sektor yang pertumbuhannya tinggi, dan menjadi sektor basis atau prioritas bersama dengan Sektor Konstruksi. Sedangkan

Pertambangan dan Penggalian diindikasikan mengalami kemunduran dan bersama dengan Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor non basis atau tidak menjadi prioritas.

3. Pemetaan Komponen Pembentuk Sektor Andalan



Gambar 5.1 Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Aspek

Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang menjadi komponen pembentuk Sektor Andalan Kota Surakarta, tercermin akan kondisi dan kemampuan Kota Surakarta dalam mengoptimalkan

pemanfaatan potensi daerah untuk mencapai kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

a) Aspek Faktor Penguat

Pada Aspek Faktor Penguat (Enabling Environment) dengan skor rata – rata sebesar 3,89 dengan Pilar Kelembagaan menghasilkan rerata skor tertinggi yaitu 4,33 ditunjukkan dengan beberapa indikator yang telah mencapai level 5 atau level tertinggi meliputi; Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, dan Presentase Penegakan Peraturan Daerah. Penopang utama Faktor Penguat (Enabling Environment) Kota Surakarta adalah Pilar Kelembagaan. Kota Surakarta memiliki kesiapan yang baik dalam hal Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Keamanan dan Keindahan, serta Indeks Reformasi Birokrasi. Selain itu Kota Surakarta ditunjang oleh Infrastruktur yang diindikasikan oleh Rasio Panjang Jalan dan Elektrifikasi yang Baik. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional yang dibuktikan dengan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) juga menjadi tolok ukur keandalan Kota Surakarta. Meski begitu, koefisien Daerah Hijau dan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) adalah komponen yang masih sangat perlu diperhatikan dan ditingkatkan.

b) Aspek Sumber Daya Manusia

Pada Aspek Sumber Daya Manusia (Human Capital) dengan skor rata – rata 4,25 dengan skor Pilar Kesehatan menghasilkan rerata skor tertinggi yaitu 4,38 dibandingkan dengan Pilar Pendidikan (3,95). Kota Surakarta dikuatkan oleh Pilar Kesehatan dengan tingginya Rasio Dokter dan Tenaga Medis, serta rendahnya Angka Persentase Gizi Buruk, Stunting, dan Kematian Bayi. Selain itu, Kota Surakarta memiliki kesiapan dalam hal penguatan Keterampilan Masyarakat yang diindikasikan oleh tingginya Jumlah

Program Pelatihan oleh BLK, Jumlah LKP dan PKBM. Kesiapan tersebut semakin dikuatkan dengan tingginya Literasi Masyarakat terhadap Digitalisasi. Tingginya Pilar Kesehatan dan Keterampilan di Kota Surakarta ini perlu dilengkapi dengan Pendidikan yang baik karena saat ini Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Kota Surakarta masih sangat rendah.

c) Aspek Pasar

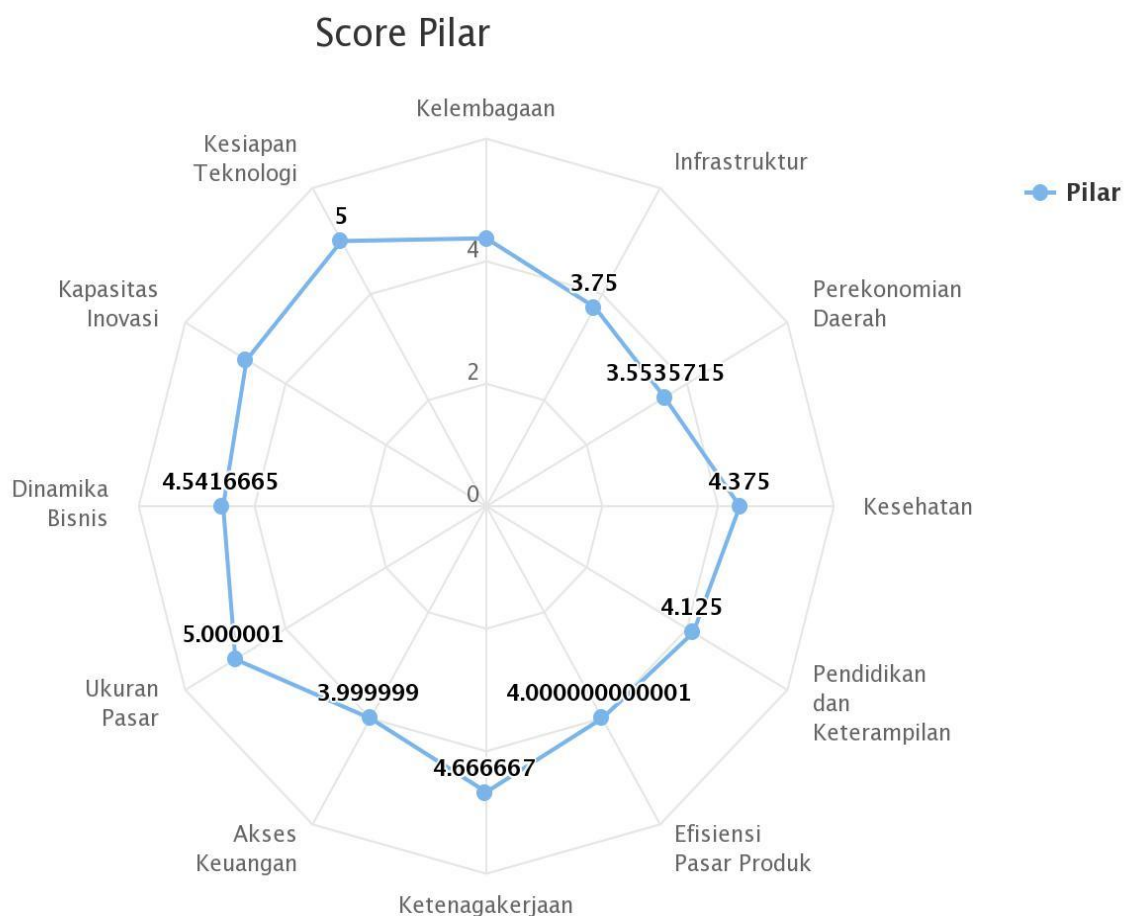
Pada Aspek Pasar (Market) nilai rata – rata adalah 4,42, Pilar Ukuran Pasar menghasilkan rerata skor sempurna yaitu 5,00 sedikit diatas Pilar Ketenagakerjaan dengan skor 4,83. Pilar Efisiensi Pasar Produk dan Pilar Aspek Keuangan menghasilkan rerata skor identik yaitu 4,00. Kapasitas Tenaga Kerja dan Ukuran Pasar Kota Surakarta sudah berada dalam kategori unggul, diindikasikan oleh Pola Kemitraan yang baik antara Industri Kecil, Menengah, Besar, dan Lembaga-lembaga usaha maupun keuangan. Selain itu, Persentase Tenaga Kerja Terdidik dan Upaya Pengembangan Tenaga Kerja oleh Pemerintah sudah dilaksanakan dengan baik. Hanya Saja, Kota Surakarta masih perlu meningkatkan Indeks Gini serta Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) terhadap sektor usaha.

d) Aspek Ekosistem Inovasi

Pada Aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta, rerata skor tertinggi diperoleh dari Aspek Telematika dan Aspek Teknologi sebesar 4,77. Ekosistem Inovasi di Kota Surakarta merupakan aspek yang potensial karena Pilar Kesiapan Teknologi dan Kapasitas Inovasi yang sangat kuat. Hal ini diindikasikan oleh Kecakapan Pemerintah dalam Pelayanan Administrasi dan Perijinan Usaha dengan Durasi Waktu Perijinan yang cepat. Selain itu Iklim Usaha Kota Surakarta didukung oleh keberadaan Kelitbangan, Perguruan Tinggi yang melakukan Komersialisasi Inovasi, serta Technopark. Keunggulan ini diindikasikan dengan jumlah perolehan perlindungan kreatifitas seperti HKI, Merek Dagang, Rahasia Dagang, dan Sertifikat untuk

Purwarupa atau Desain Industri. Kota Surakarta hanya perlu memperkuat Pertumbuhan Industri Besar dan mendorong jumlah Perjanjian Kerjasama antara Industri/ Dunia Usaha dengan Pemerintah Daerah terkait Program Pengembangan Teknologi dan Inovasi.

4. Analisis Daya Saing Berdasarkan Pilar



Gambar 5.2 Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Pilar

a) Aspek Faktor Penguat (*Enabling Environment*)

Pada Aspek Faktor Penguat (*Enabling Environment*), Pilar Kelembagaan menghasilkan rerata skor tertinggi yaitu 4,33 ditunjukan dengan beberapa indikator yang telah mencapai level 5 atau level

tertinggi meliputi; Tingkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Indeks Reformasi Birokrasi, Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3, dan Presentase Penegakan Peraturan Daerah. Meski begitu, masih terdapat indikator yang berada pada level 2 yaitu Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) yang perlu ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Pada Pilar Infrastruktur, skor terbaik ditunjukkan melalui Rasio Panjang Jalan dan Jumlah Kendaraan Bermotor, serta Rasio Elektrifikasi dimana masing-masing indikator telah mencapai level 5, berbanding terbalik dengan indikator Koefisien Daerah Hijau yang menjadi tantangan besar Kota Surakarta karena masih berada di level terendah atau level 1.

Sementara itu, pada Pilar Perekonomian Daerah, stabilitas Ekonomi Kota Surakarta diindikasikan dengan Nilai Penanaman Modal Dalam Negeri dan Indeks Ketahanan Pangan (IKP) yang berada di level 5. Pertumbuhan Ekonomi, Kapasitas Fiskal Daerah, dan PDRB per Kapita juga menunjukkan skor yang cukup signifikan yaitu berada di level 4. Yang perlu diperhatikan oleh Pemerintah Kota Surakarta adalah untuk tetap menjaga persentase peningkatan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang masih belum optimal dan berada di level 2. Pilar Perekonomian Daerah menghasilkan rerata skor 3,55 atau yang paling rendah dibandingkan dengan dua pilar lain pada Aspek Faktor Penguat.

b) Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*)

Pada Aspek Sumber Daya Manusia (*Human Capital*), Pilar Kesehatan menghasilkan rerata skor lebih baik (4,38) dibandingkan dengan Pilar Pendidikan (3,95). Tingginya rerata skor pada Pilar Kesehatan Tersebut diindikasikan melalui Persentase Gizi Buruk, Jumlah Balita Stunting, Angka Kematian Bayi, Angka Harapan Hidup, dan Rasion Dokter & Tenaga Medis yang berada pada level 5 atau dalam kondisi paling baik di Kota Surakarta. Sementara itu, walaupun Rasio Puskesmas dan Klinik sudah tinggi dengan berada di level 4,

Rasio Rumah Sakit Umum masih cukup rendah dengan berada di level 2 dan perlu menjadi perhatian Pemerintah Kota Surakarta.

Rerata nilai Pilar Pendidikan paling utama disangga oleh Persentase Jumlah Penduduk Berpendidikan D4/ S1, Peningkatan Jumlah Program Balai Latihan Kerja, Jumlah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Literasi Digital Penduduk yang berada di level 5. Pada Pilar Pendidikan, yang perlu untuk lebih diperhatikan adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi yang masih rendah dengan skor 3,20 dan berada di level 1. Meski begitu APK nasional maupun regional Provinsi Jawa Tengah memang berada di bawah 3,80.

c) Aspek Pasar (*Market*)

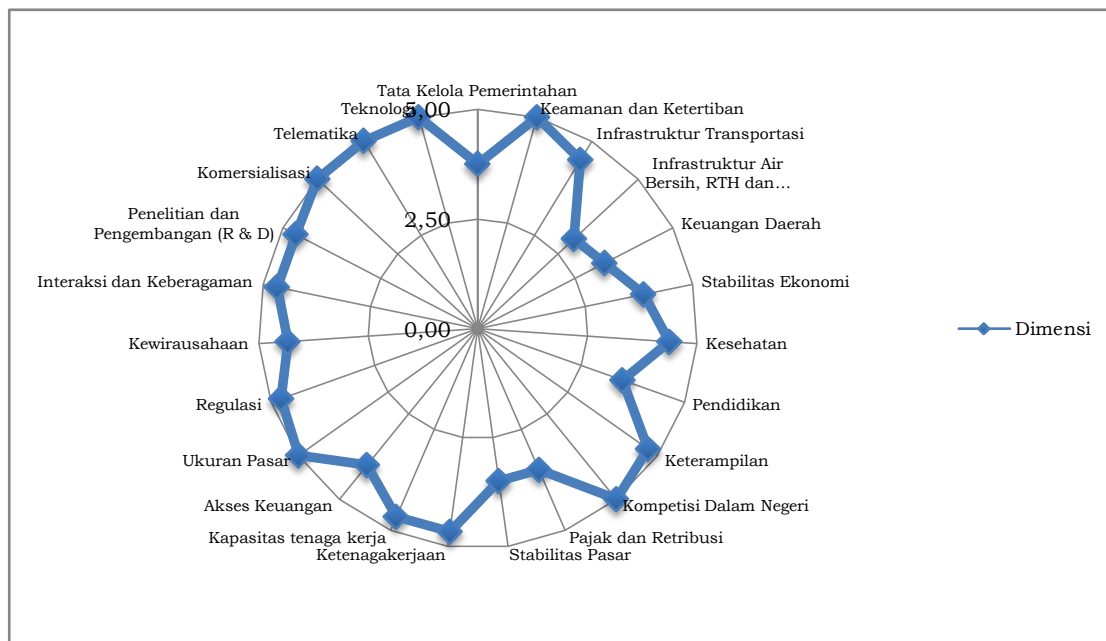
Pada Aspek Pasar (*Market*), Pilar Ukuran Pasar menghasilkan rerata skor sempurna yaitu 5,00 sedikit diatas Pilar Ketenagakerjaan dengan skor 4,83. Pilar Efisiensi Pasar Produk dan Pilar Aspek Keuangan menghasilkan rerata skor identik yaitu 4,00. Pilar Ukuran Pasar diindikasikan oleh Rasio Penduduk Usia 17, Pertumbuhan Nilai Ekspor, dan Persentase Nilai Neraca Volume Perdagangan yang berada pada level tertinggi, level 5. Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Tingkat Ketimpangan merupakan indikator yang masih perlu diperhatikan karena masih berada pada level 2. Pada Pilar Ketenagakerjaan, Persentase Angkatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun Keatas, Indeks Pembangunan Gender (IPG), Jumlah Tenaga Kerja Terdidik, Jumlah Pekerja Penuh Waktu, dan Peran Pemerintah dalam Pengembangan Tenaga Kerja berada pada level 5.

Pilar Akses Keuangan diindikasikan dengan Persentase Jumlah Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) yang Memberi Pinjaman pada Dunia Usaha, serta Persentase Pertumbuhan Kredit LKBB kepada UMKM yang telah berada pada level 5. Sementara itu perhatian lebih perlu ditujukan kepada Persentase Pertumbuhan Kredit Bank UMKM untuk Pengembangan Usaha yang masih berada di level 2.

d) Aspek Ekosistem Inovasi

Pada Aspek Ekosistem Inovasi Kota Surakarta, rerata skor tertinggi diperoleh dari Aspek Telematika dan Aspek Teknologi yang diindikasikan oleh Persentase Penduduk yang Menggunakan HP/ *Smartphone*, Proporsi Rumah Tangga Berakses Internet, dan Jumlah Inovasi Teknologi Daerah yang berada pada level tertinggi. Aspek Kapasitas Inovasi juga menunjukkan hasil yang menggembirakan pada Pilar Kapasitas Inovasi, diindikasikan oleh level tertinggi pada Implementasi Program Sistem Inovasi Daerah (SIDa), Keberadaan Klaster Inovasi Produk Unggulan Daerah, Kolaborasi Antara Pemerintah – Perguruan Tinggi – Masyarakat – Usaha, Jumlah Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional Terakreditasi, Jumlah Usaha Industri yang Memiliki Kelitbangan, Jumlah Hak Eksklusif yang Didapatkan oleh Usaha, serta Persentase Anggaran Kelitbangan Kota Surakarta. Tidak ada satupun indikator dalam Aspek Ekosistem Inovasi yang berada dibawah level 3. Pertumbuhan Usaha Industri Besar merupakan indikator yang paling rendah, yaitu berada di level 3. Aspek Ekosistem Inovasi juga didukung oleh Pilar Dinamika Bisnis yang diindikasikan dengan Regulasi Terhadap IKM, Performa Pemerintah dalam Mengurus Izin Usaha, serta Peningkatan Jumlah Perizinan yang Diterbitkan yang pada tahun ini menempati level 5 atau level tertinggi dalam Indeks Daya saing Daerah.

5. Analisis Daya Saing Berdasarkan Dimensi



Gambar 5.3 Daya Saing Kota Surakarta Berdasarkan Dimensi

Indeks daya saing Kota Surakarta berdasarkan 23 indikator dimensi memperlihatkan dimensi yang memiliki skor maksimal (5,0) adalah dimensi Keamanan dan Ketertiban, Kompetensi dalam Negeri, Ukuran pasar, Komersialisasi, Telematika dan Teknologi, Sedangkan nilai dimensi dengan skor terendah adalah Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan (3,0), Keuangan Daerah (3,25), Pendidikan (3,5), Pajak dan Retribusi (3,5), dan Stabilitas Pasar (3,5). Untuk meningkatkan daya saing Kota Surakarta kedepan perlu pembenahan dan peningkatan daya saing yang masih memiliki skore terendah.

6. Nilai Indikator Indek Daya Saing Kota Surakarta

Indeks Daya Saing Daerah disusun dengan mempertimbangkan 97 Indikator penilaian .Masing-masing indicator dinilai dengan rentang skor atau level dari 1-5 yang mengindikasikan bahwa semakin tinggi skor/ levelnya maka semakin baik penilaian dari aspek yang dinilai tersebut. Indikator-indikator tersebut berpengaruh terhadap skor

berdasarkan dimensi, pilar maupun aspek. Dari 97 indikator yang dinilai, Kota Surakarta memiliki 55 indikator yang memperoleh skor sempurna yaitu level 5. Sementara itu terdapat 21 indikator yang memperoleh skor atau level 4, sedangkan 13 indikator memperoleh skor atau level 3. Masih terdapat 8 indikator yang perlu diperbaiki karena memperoleh skor level dibawah 3, masing-masing 6 indikator berada di level 2 dan 2 indikator lainnya berada di level terendah yaitu 1.

Tabel 5.2 Indikator IDSD 2020 Dalam Kategori Skor Terendah

No.	Indikator	Kriteria Penilaian		Skor/ Level
		Maksimal	Surakarta	
1	Persentase Koefisien Daerah Hijau	≥25% dari Luas Wilayah	12,2% dari Luas Wilayah	1
2	Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	≥143,02	30,28	1
3	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	AA (>85-100)	B (68,74)	2
4	Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun Sebelumnya	Terjadi penurunan persentase nilai PAD ≥15%	Terjadi peningkatan sebesar 15,25%	2
5	Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	≥90%	61,73%	2
6	Rasio Rumah Sakit Umum per 100.000 Penduduk	≥1,32	0,48	2
7	Tingkat Ketimpangan Ekonomi (Indeks Gini)	<0,25	0,402	2
8	Persentase Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM	≥50%	23%	2

Rendahnya Koefisien Daerah Hijau (KDH) berpengaruh terhadap skor Dimensi Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan dalam pilar Infrastruktur, aspek lingkungan penguat. Rendahnya KDH bertolak belakang dengan rasio elektrifikasi yang mencapai level 5 dalam dimensi

yang sama. Sementara itu, rendahnya angka partisipasi kasar perguruan tinggi karena berdasarkan penilaian secara global, rata-rata APK Indonesia hanya dibawah 30,00 sementara Kota Surakarta memiliki APK yang lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi maupun nasional. Sementara itu skor untuk SAKIP, Peningkatan PAD, Persentase Kontribusi Pajak terhadap PAD, Rasio Rumah Sakit, dan Pertumbuhan Kredit Perbankan adalah kriteria yang masih sangat berpotensi untuk ditingkatkan dalam jangka waktu yang tidak lama.

Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, menetapkan bahwa Kota Surakarta masih perlu memperbaiki kesesuaian antara renstra, anggaran dan realisasi kegiatan baik dalam hal serapan anggaran maupun jumlah kegiatan. Selain itu, evaluasi menyatakan bahwa Kota Surakarta masih belum melakukan monitoring dan evaluasi yang dilakukan hingga ke level yang paling dalam (bawah) yaitu per individu pada setiap satuan kerja.

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta salah satunya diperoleh dari sector pendapatan dari pajak. Pajak yang memberikan nilai besar dan tetap menjadi potensi pada tahun-tahun mendatang adalah pajak yang diperoleh dari hotel dan restoran. Hal ini relevan, karena Kota Surakarta merupakan kota yang mengandalkan MICE sebagai salah satu pariwisata unggulan. Selain itu ini juga sejalan dengan kondisi pertumbuhan ekonomi kreatif dibidang kuliner Kota Surakarta yang saat ini menjadi penyumbang sector usaha kreatif terbesar kedua setelah fashion.

Sementara itu, terkait dengan jumlah rumah sakit, Kota Surakarta memiliki kendala dalam hal ketersediaan lahan atau wilayah. Keterbatasan ini sebenarnya dapat di cover dengan baik melalui sejumlah rumah sakit di Kota Surakarta yang menjadi rujukan nasional ,serta rumah sakit lain yang memiliki kapasitas besar. Jika dinilai berdasarkan jumlah rumahsakit, Surakarta memiliki jumlah rumah sakit yang sedikit namun apabila yang dijadikan aspek

penilaian adalah daya tampung dan kapasitas rumah sakit umum, Kota Surakarta sudah memiliki beberapa rumah sakit yang sangat memenuhi kriteria tersebut.

Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Kota Surakarta menurut penilaian IDSD rendah karena sebenarnya jumlah UMKM yang difasilitasi untuk dapat melakukan akses terhadap perbankan telah dilakukan dengan baik sejak kurun waktu 3 hingga 5 tahun yang lalu. Hal ini memungkinkan pada tahun-tahun terbaru sudah banyak UMKM yang telah mendapatkan akses kredit perbankan, dan hanya sedikit UMKM baru yang memperoleh kredit perbankan untuk keperluan usaha.

B. PERTUMBUHAN DAYA SAING KOTA SURAKARTA (2018-2020)

1. Indeks Daya Saing Berdasarkan Aspek

Aspek utama daya saing daerah mempertimbangkan *enabling environment* (lingkungan penguat), *human capital* (sumber daya manusia), *market* (pasar), dan ekosistem inovasi. Daya saing Kota Surakarta pada tahun 2020 berdasarkan aspek mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan penilaian yang dikonversikan sesuai format 2020, tidak ada aspek utama yang mengalami penurunan pada 2020.

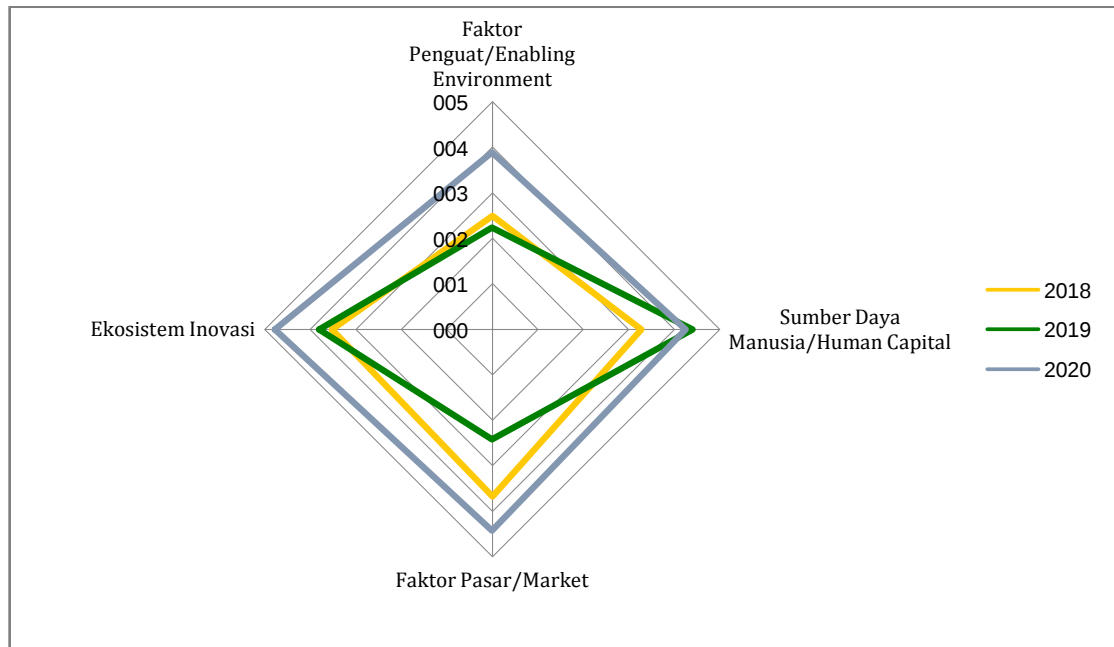
Tabel 5.3 Perbandingan Skor IDSD Berdasarkan Aspek
Tahun 2018-2020

Hasil Pemetaan Aspek		Skor Pada Tahun x			Skor Maksimal Item			Konversi Format 2020		
No.	Aspek	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Faktor Penguat/ <i>Enabling Environment</i>	3,49	1,34	3,89	7,00	3,00	5,00	2,49	2,23	3,89
2	Sumber Daya Manusia/ <i>Human Capital</i>	4,58	2,64	4,25	7,00	3,00	5,00	3,27	4,40	4,25
3	Faktor Pasar/ <i>Market</i>	5,14	1,45	4,42	7,00	3,00	5,00	3,67	2,42	4,42

4	EkosistemInovasi	4,94	2,28	4,77	7,00	3,00	5,00	3,53	3,80	4,77
---	------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Sumber : Data Diolah 2020

Gambar 5.4 Indeks Daya Saing berdasarkan Aspek 2018-2020



Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (dikonversi)

Pada tahun 2020, Ekosistem Inovasi merupakan aspek dengan skor tertinggi yaitu 4,77 sementara Faktor Penguat menjadi yang terendah yaitu 3,89. Penurunan hanya terjadi pada aspek Faktor Penguat dan Faktor Pasar pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018. Aspek pasar (*market*) perlu menjadi perhatian karena menjadi aspek yang paling fluktuatif dibandingkan dengan aspek-aspek lainnya. Terjadi penurunan signifikan dari 3,67 pada tahun 2018 menjadi 2,42 pada tahun 2019 dan kembali meningkat tajam lagi pada tahun 2020 dengan skor 4,42. Tren fluktuatif ini apabila tidak diperbaiki, maka pada tahun 2021 akan diproyeksikan menurun.

2. Indeks Daya Saing Berdasarkan Pilar

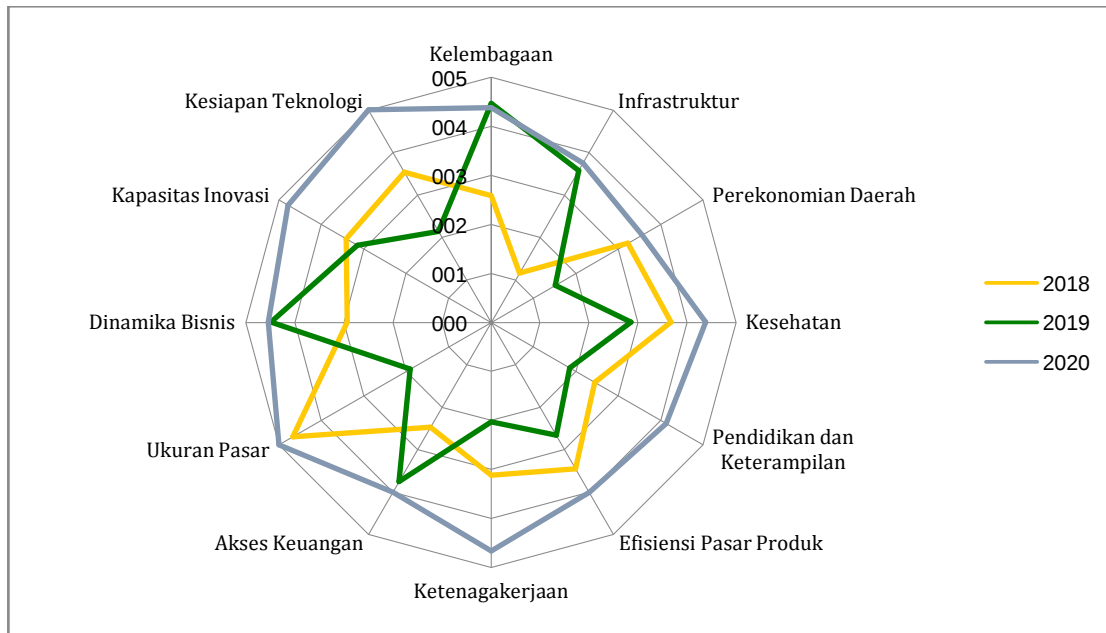
Dari 12 Pilar yang dinilai meliputi kelembagaan, infrastruktur, perekonomian daerah, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar produk, ketenagakerjaan, akses keuangan, ukuran pasar, adopsi teknologi, dinamika bisnis, dan kapasitas inovasi, secara global daya saing Kota Surakarta mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Kemampuan Kota Surakarta pada tahun 2020 lebih merata, dimana pada tahun 2018 pilar infrastruktur menjadi kelemahan yang paling utama berbanding jauh dengan ukuran pasar, serta pada tahun 2019 pilar ketenagakerjaan sangat jauh lebih rendah dibandingkan dengan pilar kelembagaan.

Tabel 5.4 Perbandingan IDSD Berdasarkan Pilar Tahun 2018 – 2020

Hasil Pemetaan Pilar		Skor Pada Tahun			Skor Maksimal Item			Konversi Format 2020		
No.	Pilar	2018	2019	2020	2018	2019	2020	2018	2019	2020
1	Kelembagaan	3,88	12,50	4,38	7,50	14,00	5,00	2,59	4,46	4,38
2	Infrastruktur	1,75	10,00	3,75	7,50	14,00	5,00	1,17	3,57	3,75
3	Perekonomian Daerah	4,83	4,25	3,55	7,50	14,00	5,00	3,22	1,52	3,55
4	Kesehatan	5,50	8,00	4,38	7,50	14,00	5,00	3,67	2,86	4,38
5	Pendidikan dan Keterampilan	3,67	5,20	4,13	7,50	14,00	5,00	2,45	1,86	4,13
6	Efisiensi Pasar Produk	5,17	7,43	4,00	7,50	14,00	5,00	3,45	2,65	4,00
7	Ketenagakerjaan	4,67	5,67	4,67	7,50	14,00	5,00	3,11	2,03	4,67
8	Akses Keuangan	3,71	10,50	4,00	7,50	14,00	5,00	2,47	3,75	4,00
9	Ukuran Pasar	7,00	5,33	5,00	7,50	14,00	5,00	4,67	1,90	5,00
10	Dinamika Bisnis	4,40	12,57	4,54	7,50	14,00	5,00	2,93	4,49	4,54
11	Kapasitas Inovasi	5,11	8,80	4,78	7,50	14,00	5,00	3,41	3,14	4,78
12	Kesiapan Teknologi	5,30	6,00	5,00	7,50	14,00	5,00	3,53	2,14	5,00

Sumber : Data Diolah 2020

Gambar 5.5 Indeks Daya Saing berdasarkan Pilar 2018-2020



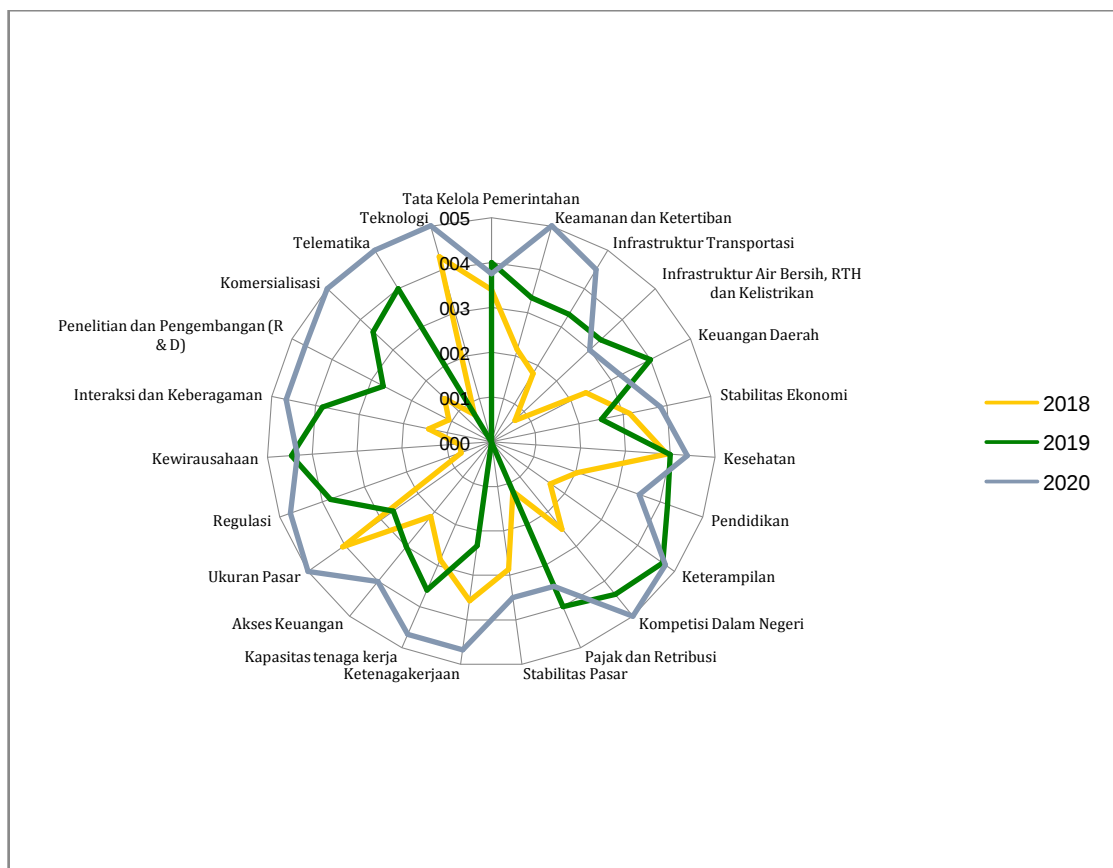
Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (dikonversi)

Pada tahun 2020, pilar ukuran pasar dan kesiapan teknologi berada pada indeks daya saing yang sempurna yaitu dengan skor 5,00 sementara perekonomian daerah dan infrastruktur berada pada indeks dibawah 4,00 yaitu masing-masing dengan skor 3,55 dan 3,75. Daya saing Kota Surakarta antara 2018 dan 2019 berdasarkan pilar perkembangannya fluktuatif namun di tahun 2020 lebih cenderung meningkat, hanya terjadi penurunan daya saing pada pilar kelembagaan. Skor kelembagaan 4,38 di tahun 2020 menandakan penurunan dibanding 2019 dengan skor 4,46. Pilar ukuran pasar perlu diperhatikan karena mengalami fluktuasi yang paling signifikan dalam tiga tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2018 pilar ukuran pasar mampu menghasilkan skor 4,67 namun mengalami penurunan drastis pada tahun 2019 menjadi 1,90 dan kembali meningkat tajam pada tahun 2020 dengan skor sempurna 5,00. Apabila memperhatikan tren, pilar ukuran pasar perlu untuk terus dijaga agar tidak mengalami penurunan kembali pada tahun 2021.

3. Indeks Daya Saing Berdasarkan Dimensi

Terdapat 23 yang digunakan sebagai kriteria penilaian daya saing daerah berdasarkan dimensi. Pada tahun 2020 daya saing Kota Surakarta berdasarkan dimensi mengalami peningkatan sekaligus pemerataan dibandingkan dengan tahun 2018 dan 2019. Pemerataan tahun 2020 ini diindikasikan dengan skor parsial berdasarkan dimensi yang mendekati skor rerata. Sementara pada tahun 2018 terdapat kejomplangan antara skor pajak dan retribusi dibandingkan dengan skor teknologi. Begitu pula pada tahun 2019 kejomplangan dicerminkan oleh skor stabilitas pasar dengan kewirausahaan.

Gambar 5.6 Indeks Daya Saing berdasarkan Dimensi 2018-2020



Sumber: Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional (dikonversi)

Berdasarkan dimensi, pada tahun 2020 tidak ada satu kriteria pun dari Kota Surakarta yang menghasilkan skor kurang dari 3,00 serta terdapat 6 dimensi yang menghasilkan nilai sempurna meliputi Keamanan dan Ketertiban, Kompetisi Dalam Negeri, Ukuran Pasar, Komersialisasi, Telematika, dan Teknologi. Meski begitu terdapat skor yang masih perlu diperhatikan antara lain adalah Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan, dimana dimensi ini diperlemah oleh rendahnya koefisien daerah hijau. Dimensi ketenagakerjaan perlu mendapat perhatian lebih karena mengalami fluktuasi yang sangat signifikan dalam rentang 2018 hingga 2020. Dimensi ketenagakerjaan mengalami penurunan drastis dari skor 3,57 pada tahun 2018 menjadi 2,33 pada tahun 2019 kemudian kembali menanjak naik lagi menjadi 4,67 di tahun 2020. Apabila memperhatikan tren, dan tidak ditangani dengan baik, maka ada proyeksi dimensi ketenagakerjaan akan mengalami penurunan skor daya saing pada tahun 2021.

C. ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN

1. Formulasi Kebijakan melalui Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD)

Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta tahun 2016-2021 terdapat isu strategis yang dijadikan landasan untuk merumuskan Kebijakan, diantaranya adalah;

a) Tata Kelola Pemerintahan (*governance*) yang Bersih, Transparan, Kolaboratif, Demokratis, dan Akuntabel

Birokrasi sebagai bagian dari aktor tata kelola pemerintahan. Isu tata kelola pemerintahan adalah isu yang strategis karena menakar efektivitas kolaborasi semua elemen, yaitu pemerintah (eksekutif), DPRD, masyarakat sipil, dan masyarakat dunia usaha.

b) Peningkatan Daya Saing Daerah yang Unggul

Pilar pendukung daya saing, yaitu: institusi, infrastruktur, makro ekonomi, kesehatan, pendidikan, efisiensi pasar barang, efisiensi pasar tenaga kerja, pasar keuangan, kesiapan teknologi, ukuran pasar, kecanggihan bisnis, dan inovasi.

c) Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat menuju Mapan, Aman, dan Nyaman

Pertumbuhan dan pemerataan merupakan dua skema untuk membangun kemakmuran. Di sisi lain pemerintah daerah dapat meluncurkan reformasi pelayanan publik dan kebijakan (pembangunan) sosial untuk mencapai kesejahteraan sosial. Pelayanan publik yang paling dasar adalah pendidikan dan kesehatan, sementara pengurangan kemiskinan merupakan aksi mendasar dalam kebijakan sosial.

d) Lingkungan Hidup yang Sehat, Selamat, dan Bermartabat

Isu lingkungan hidup dalam konteks visi misi walikota terpilih selaras dengan unsur visi sejahtera didukung misi waras, mapan, dan papan. Isu lingkungan hidup perlu ditangani lintas sektoral, karena saling terkait antara aspek regulasi kebijakan, aspek perilaku, dan aspek daya dukung serta daya tampung lingkungan.

e) Pemerataan yang Berkeadilan dalam Keterpaduan

Inti dari isu kesenjangan wilayah adalah pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Keterkaitan isu tersebut dalam konteks visi misi wali kota terpilih mendukung perwujudan unsur visi kota sejahtera yang didukung melalui misi mapan dan papan. Pembangunan infrastruktur, sarana prasarana dan transportasi harus inklusif, tidak diskriminatif, ramah bagi semua kelompok masyarakat, dari sisi gender, usia, dan perbedaan disabilitas menjadi tantangan dalam mengatasi isu kesenjangan wilayah.

2. Terobosan Strategi melalui Perencanaan Berbasis Penelitian dan Pembangunan Berbasis Perencanaan

Keunggulan daya saing Kota Surakarta bersumber dari tiga aspek yaitu factor pasar/market, sumber daya manusia dan ekosistem inovasi. Hasil analisis daya saing Kota Surakarta berdasarkan dari nilai aspek atau factor dan pilar. Keunggulan daya saing Kota Surakarta dari 3 aspek yaitu sumber daya manusia, pasar/market dan ekosistem inovasi berimplikasi pada penyusunan strategi pembangunan. Strategi ini juga dilaksanakan untuk mengatasi kelemahan yang muncul dari aspek *enabling environment*. Strategi pembangunan tersebut yaitu:

a) Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.

Komponen akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah yang direpresentasikan dalam SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah) merupakan hal penting untuk menilai kinerja pemerintah. Nilai SAKIP Kota Surakarta dalam 2 tahun berturut-turut (2018-2019) masuk dalam kategori B. Nilai B ini sudah layak mendapatkan SAKIP *award* namun demikian kota Surakarta tidak berhasil mencapai target tahun 2019 yaitu masuk dalam kategori BB. Penilaian SAKIP ini terkait dengan penggunaan anggaran serta efisiensi penggunaan anggaran. Salah satu issue penting dalam penggunaan anggaran di beberapa pemerintah daerah di Indonesia adalah masalah penyerapan anggaran. Penyerapan anggaran yang lebih baik dengan akuntabilitas serta transparansi yang baik. Hal ini berarti masalah kinerja pemerintah terkait juga dengan perencanaan anggaran. Perencanaan anggaran yang baik memuat tentang kesesuaian kegiatan dengan tujuan serta jumlah anggaran dan target capaian. Pada tahun 2020 munculnya pandemic COVID 19 menyebabkan anggaran semua pemerintah daerah di Indonesia harus di *refocusing* yang berarti penggunaan anggaran tidak sesuai dengan perencanaan anggaran. Kondisi ini bisa berpotensi

menyebabkan penilaian SAKIP di semua level pemerintah mengalami penurunan karena terjadi ketidaksesuaian antara perencanaan dan penggunaan anggaran.

b) Sosialisasi Program BLK dan Kebutuhan Industri

Ketenagakerjaan di Kota Surakarta masih terkendala dengan masalah tahun lalu yaitu ketidaksesuaian antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan industri. Hal ini dikarenakan perubahan industri dan bisnis saat ini sangat cepat, sehingga lembaga penelitian maupun pelatihan kesulitan untuk menyesuaikan diri. Namun demikian hal ini bisa diatasi dengan melakukan sinkronisasi kurikulum dan materi ajar dengan industri dan bisnis. *Training for trainer* bagi para pengajar atau instruktur di BLK secara periodik bisa menjadi cara untuk mengatasi gap kompetensi sumber daya manusia dengan kebutuhan industri.

c) Sinkronisasi Program KIP Untuk Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi.

Secara umum angka partisipasi kasar di Jawa Tengah dan Indonesia memang masih rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan, salah satunya adalah biaya pendidikan tinggi yang mahal. Terkait dengan kondisi pandemic COVID 19 yang menyebabkan daya beli masyarakat semakin turun, maka ada kemungkinan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi semakin turun. Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan cara pemerintah untuk mencegah agar kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi pelajar di Indonesia tetap terjaga. Namun demikian karena KIP Kuliah ini adalah kebijakan baru, maka perlu dioptimalkan penggunaannya oleh masyarakat. Pendidikan Menengah merupakan kewenangan dari Kemendiknas akan tetapi Dinas Pendidikan Kota Surakarta perlu mensinkronkan Program KIP dapat diakses oleh siswa SMA/SMK sehingga dapat

melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi dan diharapkan meningkatkan angka lulusan perguruan tinggi.

d) Membangun UMKM dan IKM Surakarta yang *bank able*.

Masalah yang muncul dalam aspek pasar adalah rendahnya pertumbuhan kredit perbankan maupun lembaga keuangan non bank. Kondisi ini terjadi diperkirakan karena kondisi ekonomi pada sepanjang tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif, sehingga dunia usaha terdampak. IKM dan UMKM biasanya diharapkan menjadi motor pertumbuhan ekonomi, namun kondisi mereka saat ini lebih buruk. Pemerintah merencanakan untuk memberikan stimulus berupa hibah maupun kredit lunak bagi kelompok usaha IKM dan UMKM, namun demikian mereka perlu memperkuat aspek manajemen keuangan mereka, sehingga hibah atau permodalan yang diberikan bisa dimanfaatkan secara optimal.

e) Penguatan Iklim Usaha Bagi Industri Besar, IKM dan UMKM Inovatif.

Struktur perekonomian Kota Surakarta memang tidak didominasi oleh industri besar, melainkan sektor perdagangan besar, serta pariwisata dan perhotelan. Namun demikian kota ini menjadi *hub* bagi industri pengolahan dari kabupaten di sekitarnya. Regulasi untuk memperkuat iklim bisnis di Kota Surakarta bisa mendorong iklim investasi bagi kawasan Solo Raya. Penyediaan fasilitas MICE (*Meetings Incentive Conference and Exhibition*) di Kota Surakarta merupakan representasi dari fungsi kota ini sebagai *hub* bagi industri besar di kabupaten Solo Raya. Kota Surakarta juga bisa memperkuat *intangible asset* berupa penguasaan hak kekayaan intelektual bagi pelaku industrinya, sehingga industri di Surakarta bisa menguasai mata rantai industri yang paling bernilai.

3. Kerangka Kebijakan Terintegrasi Pembangunan

a) Strategi Penguatan akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah.

Strategi ini dilaksanakan dengan kebijakan:

1) Optimalisasi Perencanaan Aktivitas Satuan Kerja Pemerintah Organisasi Pemerintah Daerah.

Kunci dari keberhasilan sebuah aktivitas adalah perencanaan aktivitas tersebut. Dalam menyusun aktivitas penentuan prosedur kerja dan capaian kegiatan bisa terukur sehingga anggaran yang direncanakan bisa efisien dalam penggunaannya. Kegiatan penyusunan perencanaan ini sebenarnya sudah dipandu dengan RPJMD maupun Renstra sehingga proses perencanaan seharusnya bisa dilaksanakan dengan baik, namun demikian kendala terkait dengan keberlanjutan sebuah aktivitas biasanya sulit untuk diterjemahkan menjadi kegiatan yang berkesinambungan. Hal ini yang melatarbelakangi strategi ini yang perlu dilaksanakan dengan pendampingan dan pelatihan secara terus menerus.

2) Optimalisasi Sistem Informasi Teknologi Pemerintah Kota.

Kota Surakarta sudah mempunyai program *Smart City* sehingga kebijakan ini bisa dilaksanakan dengan melanjutkan kembali program tersebut. Beberapa aplikasi yang dikembangkan terkait dengan fungsi pemerintahan bisa dilanjutkan dan aplikasi tersebut layak untuk di perbaharui terus menerus. Menuju Kota modern fasilitas untuk mendukung *Smart City* terus dilakukan.

b) Sinkronisasi Kurikulum BLK dan Kebutuhan Industri

Strategi ini dilaksanakan dengan kebijakan:

1) Sosialisasi Program Balai Latihan Kerja

Perubahan praktek di industri dan bisnis yang terjadi terus menerus, menuntut penyesuaian dari Balai Latihan Kerja di Kota Surakarta. Sosialisasi Program pelatihan BLK sehingga masyarakat luas dapat mengakses program tersebut sesuai dengan bidang dan minat peserta pelatihan dan diharapkan Industri dapat menyerap lulusan tersebut. Sosialisasi program pelatihan di BLK ini memunculkan interaksi yang melibatkan pelaku industri dan pebisnis serta para instruktur di BLK sehingga menjadi input penyesuaian kurikulum pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

2) *Training for Trainer* Bagi Instruktur Balai Latihan Kerja

Kegiatan lanjutan dari sosialisasi program pelatihan di BLK adalah *training for trainer* bagi para instruktur BLK untuk menyesuaikan keahlian mereka dengan kurikulum baru yang diterapkan di BLK atau menyesuaikan dengan perkembangan terbaru di dalam industri atau bisnis.

c) Optimalisasi KIP Untuk Peningkatan Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi

Program KIP dilaksanakan dengan berkoordinasi antara Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga dapat diakses oleh calon mahasiswa. Adapun Strategi kebijakan sebagai berikut:

1) Sosialisasi KIP Pada Calon Mahasiswa

Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah merupakan program unggulan baru dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Program ini belum banyak dipahami oleh pelajar maupun calon mahasiswa

sehingga Pemkot Surakarta perlu melakukan sinkronisasi dan sosialisasi untuk meningkatkan angka partisipasi kasar pendidikan tinggi.

2) Fasilitasi Pengurusan KIP

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi pengurusan KIP ini bisa dilaksanakan secara simultan dengan sosialisasinya. Kegiatan ini menjadi ranah dari Dinas Pendidikan Propinsi yang bisa diakses oleh Pemerintah Kota Surakarta dengan berkoordinasi dengan sekolah menengah atas dan sekolah vokasi di Kota Surakarta.

d) Membangun IKM dan UMKM yang *bankable*

Strategi ini dilaksanakan dengan kebijakan:

1) Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan bagi IKM dan UMKM Kota Surakarta.

Salah satu alasan perbankan sulit menyalurkan kredit pada lembaga bisnis IKM dan UMKM adalah kebanyakan lembaga bisnis tersebut tidak *bank able*. Hal ini bukan karena masalah nilai agunan, karena beberapa jenis kredit bagi IKM dan UMKM tanpa agunan, melainkan karena persyaratan dokumen bagi kredit, misalnya kelayakan bisnis. Kemampuan IKM dan UMKM untuk menyusun kelayakan bisnis menjadi sangat penting agar penyaluran kredit mengalami peningkatan.

2) Pelatihan dan Pendampingan Penyusunan Dokumen Analisis Resiko bagi IKM dan UMKM Kota Surakarta.

Dokumen lain yang diperlukan IKM dan UMKM agar menjadi *bank able* adalah dokumen analisis resiko. Dokumen ini penting agar persepsi dan antisipasi terhadap resiko bisnis sudah diperhitungkan oleh IKM dan UMKM sehingga tidak berpotensi meningkatkan NPL (*Non Performing Loan*).

e) Penguatan Iklim Usaha Bagi Industri Besar, IKM dan UMKM Inovatif.

Strategi ini dilaksanakan dengan kebijakan:

1) Penguatan Industri MICE Kota Surakarta

Kota Surakarta sudah mempunyai *master plan* industry MICE yang menjamin kota ini menjadi *hub* bagi kabupaten di Solo Raya. Kebijakan ini dilaksanakan dengan memperkuat rencana aksi dari *master plan* tersebut.

2) Pemberian Insentif Pada IKM dan UMKM yang inovatif

Inovasi berupa penelitian dan pengembangan produk dan proses bisnis bagi IKM dan UMKM merupakan investasi yang mahal, oleh karena itu Pemkot Surakarta perlu memberikan insentif dengan pemberian hibah bagi IKM dan UMKM yang mengembangkan produk baru atau memberikan fasilitasi pada mereka untuk menggunakan sumber daya dan asset dari *Solo Techno Park* untuk melaksanakan aktivitas penelitian dan pengembangan.

D. SOLUSI MENYELURUH

1. AGENDA KERJASAMA DAN KOLABORASI

Kebijakan yang direncanakan untuk meningkatkan Indeks Daya Saing Kota Surakarta memerlukan kerjasama lintas sektoral. Kerjasama lintas sektoral dilaksanakan untuk kebijakan berikut ini:

- a) Optimalisasi kegiatan perencanaan aktivitas dan system teknologi informasi dilaksanakan dengan kerjasama lintas sektoral antara Bidang Litbang Bappeda sebagai perencana dengan dinas pelaksana. Selain itu optimalisasi sistem teknologi informasi merupakan aktivitas yang dilakukan semua dinas dengan difasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian

- b) Sosialisasi Program Pelatihan BLK dan *training for trainer* merupakan kebijakan yang dilaksanakan lintas sektoral antara Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Naker Perin, BLK, pelaku bisnis dan Bidang Litbang Bappeda.
- c) Sosialisasi dan fasilitasi KIP dilaksanakan dengan berkolaborasi antara Dinas Pendidikan Nasional dan Dinas Pendidikan Kota Surakarta dengan SMU/SMK di Kota Surakarta. Selain itu Program KIP perlu disinkronisasi karena kewenangan Pendidikan menengah merupakan tupoksi Dinas Pendidikan Pusat
- d) Pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen studi kelayakan dan analisis resiko merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan kerjasama antara Dinas Koperasi dan UKM, perbankan, lembaga keuangan non bank serta perguruan tinggi di Kota Surakarta.
- e) Penguatan industri MICE merupakan kegiatan yang melibatkan asosiasi perhotelan, asosiasi biro wisata, Dinas Pariwisata, Dinas Naker Perin dan Dinas Kebudayaan.
- f) Pemberian insentif pada IKM dan UMKM yang inovatif berupa pelatihan dan pendampingan sesuai dengan aturan yang berlaku merupakan kegiatan yang melibatkan Bidang Litbang Bappeda, Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian, Dinas Koperasi dan UKM dan *Solo Techno Park*.

2. PRIORITAS PROGRAM PENYUSUNAN DAN PELAKSANAAN PENGUATAN IDSD

Prioritas program yang dilaksanakan berdasarkan urutan kepentingan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan IDSD Kota Surakarta. Aktivitas yang perlu dilakukan dalam 2 tahun ke depan adalah:

- a) Sosialisasi Program Pelatihan di BLK kepada guru SMK dan pengajar BLK dengan materi industri sesuai dengan

perkembangan saat ini yaitu bidang MICE, ekonomi kreatif, pariwisata dan *e-commerce*.

- b) Sosialisasi dan fasilitasi KIP merupakan prioritas karena bisa menjaga agar angka partisipasi pendidikan tinggi tidak turun.
- c) Pelatihan dan pendampingan penyusunan studi kelayakan bisnis dan analisis resiko merupakan prioritas berikutnya karena bisa meningkatkan pencairan kredit perbankan.
- d) Penguatan industry MICE dengan penyusunan naskah akademik Perda MICE bisa diprioritaskan karena Kota Surakarta sudah memiliki master plan MICE.

3. Konektivitas Antar kelembagaan & Kewenangan Pemerintahan.

Pelaksanaan program terkait dengan peningkatan indeks daya saing kota Surakarta melibatkan beberapa pemangku kepentingan pada beberapa level pemerintah serta pihak-pihak yang berperan penting dalam peningkatan indeks daya saing.

Semua ini bisa terlaksana jika proses perencanaan pembangunan disinkronisasikan dari level pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah, prosesnya adalah sebagai berikut:

- a) Proses perencanaan untuk menyusun strategi pembangunan di Kota Surakarta menggunakan referensi panduan dari rencana pembangunan jangka menengah dan jangka panjang dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Poin-poin penting dari rencana pembangunan nasional menjadi panduan bagi perencanaan di daerah, khususnya penguatan daya saing.
- b) Dokumen perencanaan pembangunan pada level provinsi Jawa Tengah baik rencana jangka menengah maupun panjang juga menjadi referensi dalam melakukan perencanaan pembangunan di Kota Surakarta.

- c) Dokumen hasil Musrenbang mulai dari level kelurahan sampai dengan kota menjadi masukan penting untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat di Kota Surakarta.

E. TATA KELOLA DAN DUKUNGAN

1. AGENDA KERJA PELAKSANAAN PENGUATAN DAYA SAING DAERAH

Agenda kerja pelaksanaan penguatan daya saing daerah disusun sebagai berikut:

Tahun 1

- a) Sosialisasi Program pelatihan di BLK sehingga masyarakat luas bisa mengakses program tersebut. Lulusan BLK mampu secara mandiri menciptakan lapangan pekerjaan maupun dapat diserap oleh pasar tenaga kerja.
- b) Optimalisasi Sistem Teknologi Informasi juga bisa dilaksanakan pada tahun pertama karena system dan aplikasi sudah tersedia.
- c) Proses pendampingan perencanaan pembangunan dilaksanakan pada tahun pertama karena hal ini merupakan proses rutin yang dilaksanakan di Pemkot Surakarta.
- d) Penguatan industry MICE bisa dilaksanakan di tahun pertama karena sudah ada dokumen master plan MICE.
- e) Sosialisasi dan fasilitasi KIP bisa dilaksanakan pada tahun pertama karena hal ini melekat pada tupoksi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

Tahun 2

- a) Pelatihan dan pendampingan penyusunan dokumen studi kelayakan dan analisis resiko bisnis dilaksanakan pada tahun ke-2 karena diperlukan persiapan perangkat dan materi serta dokumen kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
- b) Pemberian insentif untuk IKM dan UMKM yang inovatif sesuai dengan aturan yang berlaku dilaksanakan pada tahun ke-2

karena diperlukan dokumen dan perangkat teknis yang melibatkan beberapa stakeholder.

2. Anggaran, *Human Capital*, &Inovasi.

Dukungan anggaran merupakan faktor penting dalam menjalankan program untuk meningkatkan daya saing Kota Surakarta. Ada 3 fokus anggaran yang perlu dioptimalkan untuk meningkatkan daya saing Kota Surakarta, yaitu:

- a) Optimalisasi anggaran pengembangan SDM untuk sub tema SIDA Kota Surakarta, yaitu MICE, ekonomi kreatif, *e-government* dan kelembagaan SIDA. Secara khusus anggaran yang perlu diperkuat adalah pengembangan SDM bersertifikasi untuk MICE dan pendampingan penyusunan standardisasi kualitas pada ekonomi kreatif.
- b) Optimalisasi anggaran pengembangan *Solo Techno Park*. *Solo Techno Park* merupakan lembaga yang strategis sebagai pusat pelatihan dan pengembangan baik untuk industri maupun pemerintah dan sebagai mitra lembaga pendidikan. Secara khusus *Solo Techno Park* adalah lembaga yang merupakan perwujudan dari Sistem Inovasi Daerah Kota Surakarta.
- c) Penguatan anggaran dalam menyusun regulasi bagi terciptanya iklim usaha yang lebih baik dan program-program yang terkait dengan pemerataan kesejahteraan. Secara khusus pemberian fasilitas bagi IKM maupun UMKM di Kota Surakarta merupakan cara yang tepat untuk mengurangi kesenjangan kesejahteraan.

3. Agenda Peningkatan IDSD Tahun 2021

Sesuai dengan hasil identifikasi IDSD Tahun 2020 beberapa Dimensi dengan melihat hasil pengukuran indicator yang masih perlu untuk ditingkatkan. Adapun program dan

kegiatan dalam rangka meningkatkan skor dimensi pada tahun 2021 adalah sebagai berikut

Tabel 5.5 Program dan Kegiatan Peningkatan IDSD Kota Surakarta Tahun 2021

NO	DIMENSI	INDIKATOR IDSD	Program dan Kegiatan	Pelaksana
1	Tata Kelola Pemerintahan	Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	<i>Refocussing</i> perencanaan anggaran bagi program pemulihan ekonomi	BAPPPEDA Inspektorat, dan DPKAD
2	Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan	Luas Koefisien Daerah Hijau (KDH)	Pemanfaatan lahan kosong dan lahan bantaran sungai menjadi ruang hijau	PUPR dan PERKIM
3	Keuangan Daerah	Peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2019	Optimalisasi penerimaan pajak, Retribusi. Dan sumber lain yang sah	BPPPKAD, Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan
4	Pajak dan Retribusi	Kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Ekstensifikasi penerimaan pajak dengan digitalisasi layanan	BPPKAD
5	Kesehatan	Rasio rumah sakit umum per 100.000 (seratus ribu) penduduk	Isentif bagi investor untuk pendirian Rumah Sakit Baru	DPMPTSP
6	Pendidikan	Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi	Sinkronisasi program KIP bagi lulusan SMA/SMK	Dinas Pendidikan
7	Stabilitas Pasar	Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini)	Pemberian modal usaha bagi wirausahwan baru, Pelatihan wirausahawan baru	Dinas Koperasi dan UKM dan Disnakerperin
8	Akses Keuangan	Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha	Pelatihan Manajemen usaha	Dinas Koperasi dan UKM dan Disnakerperin

Rendahnya SAKIP berdasarkan hasil evaluasi AKIP tahun terakhir adalah terdapat realisasi renstra yang masih belum mencapai target baik dalam hal penyerapan anggaran maupun jumlah kegiatan. Monitoring dan evaluasi saat ini masih terbatas hingga ke level satuan kerja, sehingga untuk perbaikan evaluasi SAKIP perlu dilakukan monitoring dan evaluasi hingga ke level paling rendah yaitu individu dan penanggungjawab pekerjaan. Refokusing anggaran merupakan hal yang realistis sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilakukan secara optimal oleh Perangkat Daerah sekaligus memudahkan proses monitoring dan evaluasi hingga ke satuan kerja level terendah yaitu individu.

Rendahnya Koefisien Daerah Hijau Kota Surakarta disebabkan karena kondisi geografis Kota Surakarta yang secara ukuran tidak mampu menopang daerah hijau (taman kota, hutan kota, sungai, dll). Meski begitu, upaya peningkatan KDH secara masif akan menjadi treat-off bagi aspek lainnya seperti pertumbuhan wilayah industri, perhotelan, restoran, dan ruang publik yang lebih diperlukan oleh Kota Surakarta.

Pendapatan Asli Daerah Kota Surakarta mengandalkan pajak dan retribusi, untuk meningkatkan angka PAD perlu dilakukan secara perlahan agar tidak merusak iklim ekonomi terutama potensi dari investasi dan pertumbuhan iklim usaha. Pertumbuhan hotel dan resto dalam 3 tahun terakhir dinilai menjadi sektor yang paling potensial untuk menggenjot PAD Kota Surakarta.

Dalam hal jumlah rumah sakit di Kota Surakarta jika dibandingkan dengan 100.000 penduduk hanya mencapai level 2 dari level maksimal 5, artinya jumlah rumah sakit di Kota Surakarta masih relatif rendah. Meskipun begitu, jumlah rumah sakit ini tidak mencerminkan rasio daya tampung rumah sakit per 100.000 penduduk. Artinya beberapa rumah sakit di Kota Surakarta merupakan rumah sakit rujukan provinsi bahkan nasional yang memiliki daya tampung tinggi.

Angka Partisipasi Kasar Kota Surakarta sudah berada pada skor 3,12 dimana skor ini merupakan yang tinggi dibandingkan dengan APK Perguruan Tinggi Kota/ Kabupaten lain di Jawa Tengah. Bahkan APK Perguruan Tinggi Kota Surakarta secara nasional tetap berada di 10 besar nasional. Meski begitu, rendahnya skor dan level pada APK Perguruan tinggi ini lebih disebabkan oleh sistem skoring yang sudah ditetapkan secara global (internasional) berdasarkan Global Competitiveness Index oleh World Economic Forum, sehingga Kota Surakarta masih berada pada level yang rendah yaitu 1.

Kredit perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha di Kota Surakarta sudah tinggi sejak 5 tahun terakhir. Sehingga ketika yang dihitung adalah nilai pertumbuhannya, tidak terjadi pertumbuhan yang signifikan. Sejak 5 tahun terakhir Pemerintah Kota Surakarta sudah memberikan fasilitasi akses ke perbankan kepada UMKM dengan baik, yang sudah mencakup hampir seluruh pelaku usaha di Kota Surakarta. Sudah tingginya akses umkm ke perbankan inilah yang menyebabkan angka Kota Surakarta menjadi rendah jika dihitung dari aspek 'pertumbuhan'.

4. Peluang Dan Potensi Investasi Kota Surakarta

Berdasarkan identifikasi IDSD tahun 2020 potensi investasi yang masih terbuka meskipun dalam waktu dekat belum bisa direalisasikan karena kondisi saat ini terkendala pandemic covid 19 namun kedepan akan menciptakan peluang yang besar. Peluang Investasi dalam jangka panjang yang bisa direalisasikan adalah pengembangan industry MICE dengan melibatkan Asosiasi perhotelan, Asosiasi Biro Perjalanan, Kadin dan Dinas Pariwisata, Dinas Naker Perin dan Dinas Kebudayaan. Potensi investasi yang berhubungan dengan kesehatan, investasi yang bisa ditawarkan dalam jangka panjang adalah pembangunan Rumah Sakit baru sebagai bagian dari *hospitality Industry*.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Struktur perekonomian Kota Surakarta ditopang oleh sektor jasa perdagangan dan retail, jasa wisata (hotel, restoran, budaya, dan hiburan), dan jasa pendidikan serta jasa kesehatan.
2. Kontribusi sektor tersier dan sekunder lebih dominan dibandingkan dengan kontribusi sektor primer.
3. Kontribusi Sektor Kontruksi, Perdagangan besar dan eceran serta Informasi dan Komunikasi dalam rentang 2015-2019 merupakan sektor yang pertumbuhannya tinggi, dan menjadi sektor basis atau prioritas. Sedangkan Pertambangan dan Penggalian diindikasikan mengalami kemunduran dan bersama dengan Pertanian, Kehutanan, Perikanan, serta Transportasi dan Pergudangan menjadi sektor non basis atau tidak menjadi prioritas.
4. Penopang utama Ekosistem Inovasi Kota Surakarta adalah Pilar Kelembagaan. Kota Surakarta memiliki kesiapan yang baik dalam hal Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Tingkat Penyelesaian Ketertiban, Keamanan dan Keindahan, serta Indeks Reformasi Birokrasi serta ditunjang oleh Infrastruktur yang diindikasikan oleh Rasio Panjang Jalan dan Elektrifikasi yang Baik dan Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional dilihat dari investasi PMDN
5. Aspek Sumber Daya Manusia Kota Surakarta dikuatkan oleh Pilar Kesehatan dengan tingginya Rasio Dokter dan Tenaga Medis, serta rendahnya Angka Persentase Gizi Buruk, Stunting, dan Kematian Bayi.
6. Aspek Pasar di dukung oleh Kapasitas Tenaga Kerja dan Ukuran Pasar Kota Surakarta sudah berada dalam kategori unggul, diindikasikan oleh Pola Kemitraan yang baik antara Industri Kecil,

Menengah, Besar, dan Lembaga-lembaga usaha maupun keuangan.

7. IDSD berdasarkan Pilar skor yang mencapai nilai maksimal adalah pilar Kapasitas Inovasi, Kesiapan teknologi dan Ukuran Pasar, Sedangkan skor yang masih dibawah 4 adalah pilar infrastruktur dsn Perekonomian Daerah.
8. IDSD berdasarkan Dimensi skor yang mencapai maksimal 5 adalah dimensi Keamanan dan Ketertiban, Kompetensi dalam Negeri, Ukuran pasar, Komersialisasi, Telematika dan Teknologi, Sedangkan nilai dimensi dengan skor kurang dari 4 adalah Infrastruktur Air Bersih, RTH dan Kelistrikan, Keuangan Daerah, Pendidikan, Pajak dan Retribusi, dan Stabilitas Pasar.
9. IDSD berdasarkan indicator yang memiliki nilai terendah adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Luas Koefisien Daerah Hijau (KDH) Peningkatan nilai PAD terhadap total pendapatan daerah dari tahun 2019 kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rasio rumah sakit umum per 100.000 (seratus ribu) penduduk, Angka Partisipasi kasar (APK) perguruan tinggi, Tingkat ketimpangan ekonomi (Indeks Gini), Pertumbuhan Kredit Perbankan kepada UMKM untuk Pengembangan Usaha.
10. Daya saing Kota Surakarta pada tahun 2020 berdasarkan aspek mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan penilaian yang dikonversikan sesuai format 2020, tidak ada aspek utama yang mengalami penurunan pada 2020.

B. Rekomendasi

1. Sektor Pendidikan perlu mendapat perhatian karena saat ini Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi Kota Surakarta masih sangat rendah. Sinkronisasi program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah merupakan salah satu cara pemerintah Kota Surakarta untuk

mencegah agar kesempatan menempuh pendidikan tinggi bagi pelajar di Indonesia tetap terjaga. Perlu adanya sosialisasi dan fasilitasi pengurusan program KIP bagi calon mahasiswa. Dinas Pendidikan Kota Surakarta perlu melakukan sinkronisasi Program KIP bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan partisipasi kasar Perguruan Tinggi

2. Pemerintah Kota Surakarta meningkatkan pengelolaan dalam penyusunan rencana anggaran dan penggunaan anggaran serta efisiensi penggunaan anggaran sehingga akuntabilitas serta transparansi yang baik. Dalam hal ini BAPPPEDA, Inspektorat dan BPPKAD harus lebih selektif dan fokus pada perencanaan penyusunan anggaran dan penggunaan anggaran.
3. Pertumbuhan Kredit Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) terhadap sektor usaha. Kemampuan IKM dan UMKM untuk menyusun kelayakan bisnis menjadi sangat penting agar penyaluran kredit mengalami peningkatan. Perlu adanya pelatihan dan pendampingan manajemen usaha mulai dari penyusunan studi kelayakan bisnis dan Analisis resiko bisnis. Dinas Koperasi dan UKM dan Dinas Ketenagakerjaan dan Perindustrian merupakan dinas yang memiliki tupoksi dalam membina dan meningkatkan pengelolaan IKM dan UMKM melalui pelatihan dan pendampingan serta pemberian insentif bagi IKM dan UMKM binaannya. Kemudian pelatihan dan pendampingan juga diarahkan pada peningkatan manajemen usaha IKM dan UMKM bisa sehingga layak mendapatkan kredit perbankan.
4. Penguatan Iklim Usaha Bagi Industri Besar, IKM dan UMKM Inovatif dengan memperkuat industry MICE dan insentif bagi IKM dan UKM yang inovatif. Bidang Litbang Bapppeda dan *Solo Techno Park* memiliki program untuk mendorong IKM khususnya dalam meningkatkan inovasi dan mendorong daya asing IKM.
5. Optimalisasi kegiatan perencanaan aktivitas dan sistem teknologi informasi dilaksanakan dengan kerjasama lintas sektoral antara

Bappededa sebagai perencana dengan dinas pelaksana. Selain itu optimalisasi sistem teknologi informasi merupakan aktivitas yang dilakukan semua dinas dengan di fasilitasi oleh Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian.

6. Sosialisasi Program Pelatihan BLK dan *training for trainer* diharapkan dapat mengurangi pengangguran khususnya lulusan SMK sehingga ketrampilan yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.
7. Dilihat dari tingkat kedalaman dan tingkat keparahan kemiskinan di Kota Surakarta mengalami peningkatan artinya jumlah kemiskinan pada tahun 2019 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami kenaikan jumlah penduduk yang tergolong miskin. Untuk menurunkan tingkat kemiskinan perlu adanya sinkronisasi kegiatan dan kerjasama dari OPD terkait untuk meningkat kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan wirausahawan, bantuan modal kerja, insentif kepada UKM maupun IKM.
8. Peluang dan Potensi Investasi dalam jangka panjangb antara lain Industri MICE yang belum tergarap dengan optimal. Kemudian dalam jangka panjang pembangunan rumah sakit umum untuk memenuhi Rasio rumah sakit umum per 100.000 (seratus ribu) penduduk sebagai bagian dari *Hospitality Industry*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, P. (2002). *Daya saing daerah: konsep dan pengukurannya di Indonesia: lampiran, Peta peringkat daya saing antar propinsi di Indonesia*. Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan Bank Indonesia.
- Bowen, H. P., & Moesen, W. (2011). Composite competitiveness indicators with endogenous versus predetermined weights: An application to the World Economic Forum's global competitiveness index. *Competitiveness Review: An International Business Journal Incorporating Journal of Global Competitiveness*, 21(2), 129-151.
- Bristow, G. (2005). Everyone's a 'winner': problematising the discourse of regional competitiveness. *Journal of Economic Geography*, 5(3), 285-304.
- Delgado, M., Ketels, C., Porter, M. E., & Stern, S. (2012). *The determinants of national competitiveness* (No. w18249). National Bureau of Economic Research.
- Dess, Gregory G., and G. Tom Lumpkin. "The role of entrepreneurial orientation in stimulating effective corporate entrepreneurship." *Academy of Management Perspectives* 19.1 (2005): 147-156.
- Dess, G. G., Lumpkin, G. T., & Eisner, A. B. (2008). *Strategic management: Creating competitive advantages*. McGraw-Hill.
- Huggins, R., & Izushi, H. (2007). The knowledge competitiveness of regional economies: Conceptualisation and measurement. *Bank of Valletta Review*, 35(1), 1-24.
- Meyer-Stamer, J. (2008). Systemic competitiveness and local economic development. *Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices*. Alemania, Duisburg.

- Passemar, D., & Kleiner, B. H. (2000). Competitive advantage in global industries. *Management Research News*.
- Porter, M. E. (1985). Technology and competitive advantage. *The Journal of Business Strategy*, 5(3), 60.
- Porter, M. E. (1990). The competitive advantage of nations. *Harvard business review*, 68(2), 73-93.
- Porter, M. E., Delgado, M., Ketels, C., & Stern, S. (2008). Moving to a new global competitiveness index. *The global competitiveness report, 2009*, 43-63.
- Ricardo, D. (1917). *The Principles of Political Economy and Taxation*. London: JM Dent & Sons Ltd.
- Sala-i-Martin, X., Blanke, J., Hanouz, M. D., Geiger, T., Mia, I., & Paua, F. (2008). The global competitiveness index: Prioritizing the economic policy agenda. *The global competitiveness report, 2009*, 3-41.
- Sugiyono. 2005. Metode Penelitian Administrasi. Bandung :CV. Alfabeta.
- Tarigan, Robinson (2005:75). Ekonomi Regional “ Ekonomi Regional: Teori dan Aplikasi. Bumi Aksara



BAPPEDA KOTA SURAKARTA

Jl. Jend. Sudirman No.2, Kp. Baru, Kec. Ps. Kliwon, Kota Surakarta
Jawa Tengah 57133
Telp. (0271) 655 277

